



LAPORAN HASIL PENELITIAN

**STRATEGI PENUMBUHAN KEMITRAAN DAN PENGUATAN
KELEMBAGAAN PETANI UNTUK MENDUKUNG PROGRAM
KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN KONAWA**



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KONAWA**

KERJASAMA DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA
KENDARI 2015**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**STRATEGI PENUMBUHAN KEMITRAAN DAN PenguATAN KELEMBAGAAN PETANI
UNTUK MENDUKUNG PROGRAM KETAHANAN PANGAN
DI KABUPATEN KONAWE**

Telah Diperiksa dan Diseminarkan Sebagai Hasil Penelitian

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Konawe,



Drs. H. Jusmasri, M.Si.

NIP. 19610711 198703 1 013

Ketua Tim Peneliti,

Ir. La Panga Mpalasi, M.Si.

KATA PENGANTAR

Tak ada kata yang patut kita ucapkan selain memanjatkan Puji syukur kepada TUHAN YANG MAHA ESA atas izin-NYA, Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Universitas Sulawesi Tenggara dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian *Strategi Penumbuhan Dan Penguatan Kelembagaan Petani Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Di Kabupaten Konawe* dengan baik. Pada tahun anggaran 2015.

Oleh karena terdorong rasa tanggungjawab kemitraan lembaga pusat studi pembangunan pertanian dan pedesaan universitas Sulawesi Tenggara tetap menjunjung tinggi komitmen terhadap kepercayaan pihak pemerintah dan stakeholders dalam rangkaian kegiatan *Strategi Penumbuhan Dan Penguatan Kelembagaan Petani Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Di Kabupaten Konawe*.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, Namun demikian segala kemampuan penulis telah diupayakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kritik dan saran dalam rangka kesempurnaan laporan ini sangat kami harapkan.

Akhirnya penulis mengucapkan semoga TUHAN YANG MAHA ESA senantiasa memberi pahala kepada semua pihak yang turut membantu sehingga kegiatan penelitian ini berjalan dengan baik, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat. Amin.

Kendari , April 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Judul	i
Kata pengantar	ii
Daftara Isi	iii
Daftar Tabel	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Permasalahan	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II. KERANGKA ACUAN TEORITIS	7
2.1. Pola Kemitraan Tani.....	7
2.2. Kelembagaan Tani	8
2.3. Ketahanan Pangan	10
BAB III. METODE PELAKSANAAN	12
3.1. Tempat dan Waktu	12
3.2. Populasi Dan Sampling	12
3.3. Pengumpulan Data	12
3.4. Tehnik Pengolahan dan analisis Data	13
BAB IV. DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	18
4.1. Gambaran Umum Wilayah	18
4.2. Letak Geografis dan Batas Wilayah	19
4.3. Luas Wilayah	20
4.4. Penduduk dan Tenaga Kerja	21
4.5. Kondisi Pertanian	22
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	26
5.1. Karakteristik Demografi Respondent	26
5.2. Karakteristik Bentuk Usaha Tani.....	32
5.3. Penumbuhan Kemitraan Dan Penguatan Kelembagaan Petani	38

5.4. Inventarisasi dan Pembobotan Factor-Faktor Strategi Lingkungan Eksternal	43
5.5. Inventarisasi dan Pembobotan Factor-Faktor Strategi Lingkungan Internal	61
5.6. Formula Strategi	83
5.7. Prioritas Strategi	84
5.8. Kebijakan pengembangan usaha tani melalui penumbuhan kemitraan dan penguatan kelembagaan dalam rangka ketahanan pangan	91
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	101
6.1. Kesimpulan	101
6.2. Rekomendasi	104
Daftar Pustakan	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

No	Judul table	Hal
3.1	Format Penentuan Bobot Fakto-Faktor Strategi Yang Berpengaruh Terhadap Penumbuhan Kemitraan Dan Penguatan Kelembagaan Petani Dalam Mendukung Ketahanan Pangan.....	15
3.2	Model Matriks strengths, weaknesses, opportunities, threats (SWOT)	16
4.1	Jumlah produksi buah-buahan di kabupaten konawe dari tahun 2010 – 2013	23
5.1	Rata-rata umur pendidikan, pengalaman dan pendapatan menurut jenis usaha tani	26
5.2	Distribusi responden berdasarkan kisaran umur	28
5.3	Distribusi responden berdasarkan jenjang pendidikan formal	29
5.4	Distribusi responden berdasarkan kisaran pengalaman usahatani..	30
5.5	Distribusi responden berdasarkan kisaran pendapatan kotor usahatani	31
5.6	Potensi lahan persawahan berdasarkan kecamatan sampling	33
5.7	Realisasi panen padi sawah berdasarkan kecamatan	34
5.8	Potensi wilayah perikanan berdasarkan kecamatan	35
5.9	Potensi ternak berdasarkan jenis ternaknya	37
5.10	Distrbusi jumlah kelompok berdasarkan jenis kelompok Kecamatan Kapoiala	38
5.11	Distrbusi jumlah kelompok berdasarkan jenis kelompok kecamatan Anggaberri	40
5.12	Distrbusi jumlah kelompok berdasarkan jenis kelompok Kecamatan Wonggeduku	41
5.13	Distrbusi jumlah kelompok berdasarkan jenis kelompok Kecamatan U'epai	42
5.14	Urutan skor bobot fakro-faktor strategi eksternal.	44
5.15	Urutan skor bobot factor-faktor strategi lingkungan internal	63
5.16	Formulasi strategi penumbuhan kemitraan daqn penguatan kelembagaan dalam rangka ketahanan pangan di Kabupaten Konawe	83
5.17	Penentuan Prioritas/Alternative Strategi Penguatan Kelembagaan Dan Penumbuhan Kemitraan Dalam Rangka Ketahanan Pangan Di Kabupaten Konawe	85
5.18	Urutan prioritas strategi penumbuhan kemitraan dan penguatan kelembagaan dalam rangka ketahanan pangan di Kabupaten Konawe	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pertanian pada hakekatnya adalah pembangunan manusia yang bergerak pada sektor pertanian seutuhnya dan pembangunan masyarakat tani seluruhnya. Implementasinya adalah pembangunan pertanian akan diarahkan pada upaya peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis yang utuh dan menyeluruh yang menyentuh pada segala aspek kehidupan manusia termasuk kegiatan petani yang bergerak dalam lapangan pertanian. Pengembangan agribisnis yang utuh dan menyeluruh dimaksudkan bahwa pemberdayaan sistem agribisnis secara interkoneksi antar subsistem baik dari subsistem hulu (agroinput), budidaya, agroindustri maupun agroniaga sebagai hilir serta subsistem jasa penunjang (kelembagaan, finansial dan aspek hukum).

Pada tahun 2015 - 2020 dengan era ASEAN COMMUNITY ini, merupakan awal bangkitnya ekonomi ASEAN dan perubahan paradigma pembangunan yang disebabkan hal-hal sbb; (1). Pelaksanaan pembangunan nasional termasuk pembangunan pertanian dituntut lebih demokratis, transparan, desentralisasi, good governance dan partisipasi masyarakat. (2) pelaksanaan pembangunan akan diarahkan pada peningkatan sebesar-besarnya peranserta masyarakat dan pemerintah hanya berperan sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator. (3). Dalam penerapan desentralisasi, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 dan PP No. 25 tahun 2000.

Hal ini sesuai dengan grand strategi yang diterapkan kementerian pertanian bahwa dalam pembangunan agribisnis pada intinya mencakup 4 hal penting; (1). Pembangunan pertanian menjadi inti pembangunan nasional, (2). Pembangunan pertanian harus dilakukan melalui pendekatan sistem agribisnis, (3). Keberhasilan pembangunan agribisnis sebagian besar tergantung pada faktor penentu dan kebijaksanaan diluar jalur kewenangan kementerian pertanian. (4) pengembangan

agribisnis harus mampu meningkatkan daya saing, membangun ekonomi kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi dalam kerangka penguatan ekonomi daerah.

Sesuai dengan visi pembangunan pertanian tanaman pangan tahun 2015-2020 adalah terwujudnya pertanian tangguh untuk memantapkan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah, dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani. Sebagai misi pembangunan pertanian dapat dituangkan dalam hal-hal : (1). Mewujudkan birokrasi pertanian yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, (2) mendorong pembangunan pertanian menuju pertanian tangguh, berdaya saing dan berkelanjutan. (3). Mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan pengeneragaman pangan, (4) mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan PDB, ekspor, penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (5) memfasilitasi pelaku usaha melalui pengembangan teknologi, pembangunan sarana, prasarana, pembiayaan dan akses pasar dan kebijakan pendukung, (6) memperjuangkan kepentingan dan perlindungan terhadap petani dan pertanian Indonesia dalam sistem perdagangan internasional/ global.

Pangan adalah komoditas strategis karena menjadi kebutuhan dasar manusia. Pangan tidak hanya penting secara strategis dan ekonomis, tetapi juga dari segi pertahanan dan keamanan serta segi sosial dan politik. Pengalaman menunjukkan bahwa ketahanan dan ketentraman suatu negara amat ditentukan oleh ketersediaan pangan.

Dalam program pembangunan nasional (PROPENNAS) 2004, dikatakan bahwa pangan adalah salah satu kebutuhan yang paling mendasar untuk pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi sejak dari janin hingga lanjut usia. Dengan demikian pembangunan pangan adalah bagian dari pembangunan nasional dalam upaya peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

Dalam kaitannya dengan penyediaan pangan pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program yang diarahkan kepada peningkatan dan penganeekaragaman dalam penyediaan dan konsumsi pangan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan produksi beras melalui pelaksanaan program intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi. Upaya tersebut telah membuahkan hasil dengan tercapainya swasembada pangan pada tahun 1984.

Erwidodo,dkk, (1999) dalam Bulkis,(2012) mengatakan bahwa keberhasilan peningkatan produksi beras, orientasi pembangunan pangan perlu diperluas, tidak hanya swasembada beras tetapi swasembada pangan secara keseluruhan melalui reorientasi pembangunan dibidang pangan yang meliputi lima aspek yakni; (1). Dari orientasi swasembada beras menjadi swasembada pangan, (2) dari orientasi pemenuhan kuantitas menjadi orientasi yang semakin menekankan kepada kualitas pangan, (3). Dari orientasi produksi yang menekankan kepada upaya mencukupi melalui peningkatan produksi, menjadi orientasi untuk menghasilkan/memproduksi pangan yang sesuai dengan permintaan pasar. (4). Dari orientasi yang menitikberatkan kepada komoditas tunggal (single commodity) menjadi orientasi kepada pangan yang beraneka ragam. (5). Orientasi yang berupaya untuk mengatasi situasi yang berlebih melalui mekanisme pasar (dari orientasi protektif kepada orientasi mekanisme pasar).

Selain usaha tersebut di atas, pemerintah juga menerapkan kebijaksanaan cadangan pangan dan perdagangan pangan melalui kebijakan harga pangan. Stabilitas harga pangan telah mampu mengadopsi teknologi maju, peningkatan produktivitas dan pendapatan petani, serta konsumsi pangan dan perbaikan gizi masyarakat terus mengalami peningkatan secara konsisten (Suryana, dan Budianto, 1998) dalam Bulkis, (2012).

Dari tingkat produktivitas yang dicapai pada tahun 2008, menunjukkan ketersediaan energi rata-rata penduduk indonesia mencapai 3.056 kkal/kapita/hari dan angka ketersediaan protein sebanyak 81,20 gr/kapita/hari. Hal ini berarti

melampaui kecukupan ketersediaan energi berdasarkan pola pangan harapan sebanyak 2200 kkal/kapita/hari dan angka kecukupan protein sebanyak 55 gr/org/hari. LIPI, 2004.

Secara umum konsumsi energi rata-rata semakin mendekati kebutuhan sebesar 2000 kkal/kap/hari dan pada tahun 2007 bahkan telah memenuhi angka kecukupan dengan rata-rata sebesar 2015 kkal/kap/hari atau 100,7 % dari angka kecukupan energi. Di wilayah pedesaan pada tahun yang sama konsumsi energi sebesar 2067 kkal/kap/hari (103,3 % AKE) sementara di perkotaan hanya 99,8 % AKE.

Walaupun persediaan pangan Indonesia telah berada diatas kecukupan energi, yang dianjurkan , namun gambaran rata-rata nasional tidak dapat diperunakan sebagai petunjuk akan ada tidaknya masalah pangan dan gizi masyarakat, karena angka rata-rata hanya menerangkan potensi nyata persediaan pangan, tetapi tidak dapat menerangkan pemerataan ketersediaan dan keanekaragaman pangan baik antar daerah, antar golongan masyarakat maupun antar keluarga termasuk antar anggota keluarga.

Disparitas ketersediaan dan keanekaragaman konsumsi pangan antara lain disebabkan oleh beberapa faktor; (1). Kondisi wilayah, ekosistem, (2) sosial budaya; seperti kebiasaan makan, pengetahuan gizi dan lainnya, (3) dukungan sarana pendukung (transportasi untuk pendistribusian pangan, (4) kesenjangan kemampuan dalam memperoleh bahan pangan/daya beli berbeda.

Kabupaten Konawe memiliki distribusi wilayah ekosistem yang beragam dan menyebabkan perbedaan dalam ketersediaan pangan maupun distribusinya. Karena itu pembangunan pertanian pada daerah ini bertujuan untuk ; (1). Meningkatkan produksi pertanian dalam rangka memantapkan kemandirian dan ketahanan pangan, (2) mendorong tumbuh dan berkembangnya agribisnis sebagai pemicu tumbuhnya ekonomi dipedesaan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (3) mendorong tumbuhnya industri hulu, hilir dan

penunjang dalam rangka peningkatan daya saing dan nilai tambah sektor pertanian.
(4) meningkatkan volume dan keagaman ekspor produk pertanian.

1.2. Rumusan permasalahan

Berdasarkan fakta di atas dengan mengambil tema strategi menumbuhkan kemitraan dan penguatan kelembagaan petani dalam rangka ketahanan pangan daerah dapat dirumuskan pertanyaan peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi menumbuhkan kemitraan dan penguatan kelembagaan petani dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Konawe.
2. Faktor- faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penumbuhan kemitraan dan penguatan kelembagaan petani dalam rangka ketahanan pangan daerah Kabupaten Konawe.
3. Bagaimana menentukan prioritas strategi penumbuhan dan penguatan kelembagaan dalam rangka ketahanan pangan daerah Kabupaten Konawe.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui strategi dalam menumbuhkan kemitraan dan kelembagaan petani dalam mendukung ketahanan pangan Kabupaten Konawe.
- b. Untuk mengetahui factor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi penumbuhan kemitraan dan penguatan kelembagaan dalam rangka ketahanan pangan Kab. Konawe
- c. Untuk mengetahui prioritas strategi penumbuhan kemitraan dan penguatan kelembagaan dalam rangka ketahanan pangan daerah Kabupaten Konawe.

1.4. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari rencana penelitian ini adalah sebagai berikut yakni :

1. Dapat mengetahui strategi penumbuhan kemitraan dan penguatan kelembagaan yang dapat mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Konawe
2. Dapat mengetahui factor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi penumbuhan kemitraan dan penguatan kelembagaan demi terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Konawe.
3. Dapat mengetahui strategi yang akan menjadi prioritas untuk dilakukan dalam menumbuhkan kemitraan dan penguatan kelembagaan yang mengarah pada ketahanan pangan Kabupaten Konawe.

BAB II

KERANGKA ACUAN TEORITIS

2.1. POLA KEMITRAAN TANI

Teori kemitraan positif (*Positive Agency Theory*) memberikan penekanan pada pengaruh adanya tambahan aspek pada kontrak, teknologi, pengawasan dan penjaminan kontrak, serta bentuk organisasi yang diperlukan. *Principal-Agent Relationship* dapat didefinisikan sebagai hubungan di mana satu orang atau lebih sebagai pemberi kepercayaan (*principals*) mempengaruhi pihak lain sebagai mitra yang menerima kepercayaan (*agents*) untuk melaksanakan beberapa tugas *principals* melalui pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada mitra (JENSEN dan MECKLING, 1976; NUGROHO, 2006). Implikasi hubungan (P-A) dalam teori kemitraan adalah: (a) Munculnya biaya transaksi ekonomi (*transaction cost economy/TCE*), seperti biaya koordinasi, biaya informasi, dan biaya strategi; (b) Masalah ketidaksepadanan informasi (*asymmetric information*) yang terkait dalam hubungan P-A dan (c) Masalah yang menyangkut pemindahan hak kepemilikan (*transfer of rights*).

Secara teoritik kemitraan usaha berada pada ranah ilmu ekonomi kelembagaan. Salah satu teori yang sangat relevan untuk membahas kemitraan usaha adalah *Agency Theory* yang menjelaskan hubungan-hubungan hierarki atau pertukaran hak kepemilikan antar individu atau organisasi (EGGERTSSON, 1990; NUGROHO, 2006). Teori

Principal-Agents (P-A) memfokuskan pada kajian bentuk-bentuk kontrak yang optimal, keseimbangan kesejahteraan antar pelaku, pembagian risiko, struktur informasi, serta kinerja ekonomi yang dihasilkan.

BAUMANN (2000) mendefinisikan kontrak sebagai suatu sistem dimana unit perusahaan membeli hasil panen petani atau peternak dan dalam hal pembelian tersebut dituangkan melalui kontrak yang ditetapkan dimuka. KARTASASMITA (1996) mengemukakan bahwa kemitraan usaha, terutama dalam dunia usaha adalah hubungan antar pelaku usaha yang didasarkan pada ikatan usaha yang saling menguntungkan dalam hubungan kerja yang sinergis, yang hasilnya bukanlah suatu *zero-sum-game*, tetapi *positive-sum game* atau *win-win situation*. Berdasarkan Undang-Undang No. 9 tahun 1995 kemitraan usaha adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah/usaha besar yang disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

2.2. KELEMBAGAAN TANI

Kelembagaan kemitraan yang berlaku adalah model kemitraan agribisnis antara kelompok tani dan atau STA dengan pelaku agribisnis lainnya (*supplier, supermarket, hotel/restoran*). Aturan main yang ditetapkan oleh STA Sari Buah di Kecamatan Pupuan dengan petani produsen adalah sebagai berikut: (1) STA membeli seluruh produksi manggis yang dihasilkan petani mitra; (2) Harga pembelian oleh STA

dari petani sesuai dengan harga pasar, yaitu harga pasar domestik yang dikoreksi oleh harga ekspor; (3) Petani produsen boleh menjual langsung ke STA dan atau melalui pedagang pengumpul yang menjadi kaki-tangan STA Sari Buah; dan (4) Pembayaran kepada petani dilaksanakan secara tunai. Harga manggis masih di atas harga impas karena terdapat koreksi harga ekspor sehingga harga manggis di tingkat petani menjadi lebih tinggi dan layak bagi petani.

EATON dan SHEPHERD (2001) membagi lima model kelembagaan kemitraan usaha. Pertama, *centralized model*, yaitu model yang terkoordinasi secara vertikal, dimana sponsor membeli produk dari para petani/peternak dan kemudian mengolah, mengemas, dan memasarkan produknya. Kedua, *nucleus estate model*, variasi dari model terpusat, dimana dalam model ini perusahaan mitra juga memiliki dan mengatur sumberdaya yang biasanya dekat dengan pabrik pengolahan. Ketiga, *multipartite model*, biasanya melibatkan badan hukum dan perusahaan swasta yang secara bersama berpartisipasi bersama para petani atau peternak. Keempat, *informal model*, model yang biasanya diaplikasikan terhadap wiraswasta perseorangan yang membuat kontrak produksi informal yang mudah dengan para petani secara musiman. Kelima *intermediary model*, model pemberdayaan masyarakat petani atau peternak melalui mediasi lembaga pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat dalam menjalin kemitraan usaha dengan perusahaan (pembeli), fasilitasi dalam penyediaan dana, serta bimbingan dan penyuluhan.

PEARCE dan TURNER (1990) mengidentifikasi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai upaya memaksimalkan manfaat bersih suatu pembangunan ekonomi dengan syarat dapat mempertahankan dan meningkatkan jasa, kualitas dan kuantitas sumber daya alam (peternakan) sepanjang waktu. Dengan demikian agribisnis berkelanjutan pada unggas lokal dapat didefinisikan sebagai agribisnis unggas lokal yang pada waktu mendatang dapat kompetitif, produktif, menguntungkan, mengkonservasi sumber daya unggas lokal, melindungi lingkungan terkait unggas lokal, meningkatkan kesehatan peternak, kualitas pangan berbasis unggas lokal, dan keselamatan konsumennya. Dalam pembangunan agribisnis unggas lokal berkelanjutan harus mampu mendayagunakan sumber daya unggas lokal yang bersifat pulih (*renewable*) dengan laju yang kurang atau sama dengan laju pemulihan alamnya.

2.3. KETAHANAN PANGAN

Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis. Pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa tidak ada satu negarapun yang dapat melaksanakan pembangunan dengan baik sebelum mampu mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu. Menurut UU No 7/1996 tentang Pangan, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Pemenuhannya menjadi bagian dari hak asasi setiap individu. Di Indonesia pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh rakyat merupakan kewajiban moral, sosial, maupun hukum, termasuk hak asasi setiap rakyat Indonesia. Undang-undang tentang Pangan tersebut

mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dewasa ini Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar no 4 dunia (pada tahun 2010 berjumlah 239,871 juta jiwa) dengan laju pertumbuhan penduduk di kisaran 1,2 atau 1,3%. Penduduk Indonesia diperkirakan berjumlah 337 juta jiwa di tahun 2050, sehingga upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan merupakan tantangan yang harus mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan bangsa. Produksi pangan nasional perlu secara signifikan ditingkatkan agar kebutuhan domestik dapat dipenuhi.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1. Tempat dan Waktu

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Konawe, dan akan dilakukan selama 3 (tiga) bulan yaitu dimulai pada bulan februari sampai dengan bulan april 2015.

3.2. Populasi dan Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah petani padi sawah, peternak dan petani tambak yang mempunyai kemitraan dan kelompok serta yang akan dibentuk kemitraan dan kelompoknya.

Sampling frame yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebanyak 80 responden yang diambil secara *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan cara disengaja untuk wilayah petani, peternak dan petani tambak.

3.3. Pengumpulan Data

1. Jenis data

Jenis data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif adalah jumlah kelompok dan kemitraan yang telah terbentuk atau yang akan dibentuk, jumlah penduduk, petani, peternak, dan petani tambak serta data penduduk lainnya. Sedangkan data kualitatif meliputi data hasil kajian dengan pertanyaan (What, where, who, when and how) 4 W + 1 H. dalam hal ini kegiatan dilakukan dalam pengambilan data secara kualitatif yakni mengidentifikasi kemitraan dan kelompok apa yang bergerak pada kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan, siapa ketua kelompoknya,

dimana kelompok itu dibentuk dan bagaimana cara kerja atau kerjasama kemitraan yang dibangun dan kerja kelompok yang terbentuk.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini akan diperoleh data primer dan data sekunder. Data primer dapat dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, focus grup discussion (FGD). Sedangkan data sekunder dapat diperoleh melalui pengumpulan data-data pendukung dari instansi terkait dan data dokumentasi.

3.4. Tehnik Pengolahan Dan Analisis Data

1. Analisis strategi penumbuhan kemitraan dan Penguatan kelembagaan dalam mendukung ketahanan pangan

Data-data yang akan diperoleh dari hasil penelitian akan diolah dan dianalisis secara bertahap yang diawali dengan inventarisasi dan pembobotan faktor-faktor strategi yang berpengaruh. Hasil inventarisasi dari faktor-faktor strategi dianalisis dengan menggunakan matriks Strengths, Weaknesses, Opportunitites, Threats (SWOT). Kemudian akan dilanjutkan dengan analisa Quantitative Strategic Planning Matriks (QSPM).

a. Inventarisasi Faktor-Faktor strategi yang Berpengaruh

Invetarisasi terhadap faktor-faktor strategi yang berpengaruh terhadap penumbuhan kemitraan dan penguatan kelembagaan petani dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Konawe akan dilakukan melalui kajian terhadap data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengisian daftar quesioner, sedangkan data sekunder akan diambil dari berbagai instansi terkait. Analisis ini dimaksudkan akan menyederhanakan dan mengevaluasi faktor-faktor strategi eksternal (peluang dan ancaman) dalam

berbagai kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan yang ada di Kabupaten Konawe.

b. Penentuan bobot faktor eksternal dan internal untuk analisa QSPM

Dari hasil inventarisasi faktor-faktor eksternal dan internal akan dilakukan pembobotan sebagai bahan untuk analisis QSPM. Penentuan bobot pada masing-masing faktor dilakukan dengan metode paired comparisons atau yang dikenal dengan tehnik pengambilan pasangan. Pemberian nilai akan didasarkan pada perbandingan berpasangan antara dua faktor secara relatif sesuai tingkat kepentingan. Faktor-faktor strategi pada indikator vertikal dan horizontal diberi skor bobot 1,2 dan 3 secara konsisten.

Nilai 1 pada matrik berarti akan menandakan faktor strategi pada indikator horizontal kurang penting dari faktor strategi indikator vertikal. Nilai 2 berarti faktor strategi pada indikator horizontal sama pentingnya dengan faktor strategi pada indikator vertikal. Nilai 3 berarti faktor strategi pada indikator horizontal lebih penting daripada faktor strategi pada indikator vertikal. Matriks penentuan bobot faktor-faktor strategi yang berpengaruh terhadap penumbuhan kemitraan dan penguatan kelembagaan petani dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Konawe terlihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Format Penentuan Bobot Fakto-Faktor Strategi Yang Berpengaruh Terhadap Penumbuhan Kemitraan Dan Penguatan Kelembagaan Petani Dalam Mendukung Ketahanan Pangan.

Faktor strategi	Faktor strategi						Jumlah	Bobot
	A	B	C	D	N		
A		1	2				a	c
B	3							
C	2							
D								
.....								
N								
Total							b	1

a : Jumlah nilai hasil perbandingan berpasangan antara faktor strategi pada indikator vertikal dengan faktor strategi pada indikator horizontal.

b : Jumlah Total nilai

c : Nilai a dibagi nilai b

c. Matriks Strengths, Weaknesses, Opportunitites, Threats (SWOT)

Analisa ini dimaksudkan akan mencocokkan factor-faktor internal dan eksternal kunci untuk memperoleh empat alternative tipe strategi (1) strategi SO atau strategi kekuatan – peluang, yakni menggunakan kekuatan internal organisasi untuk memanfaatkan peluang eksternal, (2) strategi WO atau strategi kelemahan – peluang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang eksternal, (3) strategi ST adalah strategi kekuatan – ancaman yaitu menggunakan kekuatan organisasi untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal , (4) strategi WT atau strategu kelemahan- ancaman merupakan taktik defensif untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari

ancaman eksternal. Rencana skema matriks SWOT yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2. Model Matriks strengths, weaknesses, opportunities, threats (SWOT)

IFAS EFAS	STRENGTHS (S) Tentukan 5-10 faktor-faktor kekuatan internal	WEAKNESSES (W) Tentukan 5-10 faktor-faktor kelemahan internal
OPPORTUNITIES (O) Tentukan 5-10 faktor-faktor peluang eksternal	STRATEGI SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
TREATHS (T) Tentukan 5-10 faktor-faktor ancaman eksternal	STRATEGI ST Ciptakana strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Tahapan analisis menggunakan matriks SWOT adalah sebagai berikut :

1. Membuat daftar peluang dan ancaman eksternal
2. Membuat daftar kekuatan dan kelemahan internal
3. Mencocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan mencatat hasilnya pada kolom strategi SO
4. Mencocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal dan mencatat hasilnya pada kolom strategi WO
5. Mencocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan mencatat hasilnya pada kolom strategi ST
6. Mencocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan mencatat hasilnya pada kolom strategi WT

d. Analisa Quantitative Strategic Planning Matriks (QSPM)

Analisa menggunakan QSPM akan bertujuan untuk menentukan peringkat atau prioritas strategi serta menetapkan daya tarik relative dari tindakan alternative yang layak. Input untuk analisa QSPM ini adalah hasil inventarisasi dan pembobotan factor-faktor strategi eksternal dan internal

yang berpengaruh dan hasil analisa matriks SWOT seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Langkah-langkah untuk analisa QSPM yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mendaftarkan peluang/ancaman lingkungan strategi eksternal dan kekuatan/kelemahan lingkungan internal dari objek peneliti.
2. Memberikan bobot untuk setiap factor sukses kritis eksternal dan internal.
3. Mencocokkan matriks dan mengidentifikasi strategi alternatif yang harus dipertimbangkan untuk diimplementasikan.
4. Menetapkan nilai daya tarik atau attractiveness score (AS), yakni nilai yang menunjukkan ketertarikan relatif untuk masing-masing strategi yang akan dipilih. Nilai AS = 1 berarti tidak menarik, nilai 2 agak menarik, dan nilai 3 menarik, serta nilai 4 berarti sangat menarik.
5. Menghitung total nilai AS yang ditetapkan berdasarkan hasil perkalian bobot (langkah b) dengan nilai AS (langkah d) dalam setiap baris. Semakin tinggi nilainya berarti alternatif strategi tersebut semakin menarik, tetapi pada tahap ini masih didasarkan pada factor sukses kritik baris tersebut.
6. Menghitung jumlah total nilai AS dengan cara menjumlahkan total nilai AS dalam tiap kolom strategi. Nilai tertinggi menunjukkan strategi yang paling menarik dengan telah memperhitungkan semua factor sukses kritik eksternal dan internal.

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

4.1. Gambaran umum wilayah

Kabupaten Konawe adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 16.480 km² dan berpenduduk sebanyak 443.911 (2000). Kabupaten Konawe ibukotanya Unaaha, 73 km dari Kota Kendari. Permukaan tanah pada umumnya bergunung dan berbukit yang diapit dataran rendah yang sangat potensial untuk pengembangan sector pertanian.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Konawe tahun 2004 atas dasar harga berlaku mencapai 1.361.067,87 juta rupiah atau naik sebesar 6,50 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 1.168.266,89 juta rupiah. Atas dasar harga konstan 2000, PDRB tahun 2004 adalah sebesar 841.399,18 juta rupiah atau naik sekitar 6,69 persendari tahun sebelumnya yang mencapai 788.643,71 juta rupiah. PDRB perkapita Kabupaten Konawe atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp. 4.649.411,35,- tahun 2003 menjadi Rp. 5.405.481,73,- tahun 2004 atau meningkat sebesar 16,26 persen, sementara atas dasar harga konstan naik dari Rp. 3.138.605,59,- tahun 2003 menjadi Rp. 3.341.617,29,- tahun 2004 atau meningkat 6,47 persen.

4.2. Letak geografis dan batas wilayah

Kabupaten Konawe ibu kotanya adalah Unaaha yang berjarak sekitar 73 km dari Kota Kendari, secara geografis terletak dibagian selatan Katulistiwa, memanjang dari utara ke selatan di antara antara 3°00' – 4°25' Lintang Selatan dan membentang dari barat ke timur antara 121°73' – 123°15' Bujur Timur dengan batas wilayah:

Utara Provinsi Sulawesi Tengah

Selatan Kabupaten Konawe Selatan

Barat Kabupaten Kolaka

Timur Laut Banda dan Laut Maluku

Permukaan tanah pada umumnya bergunung dan berbukit yang diapit dataran rendah yang sangat potensial untuk pengembangan sector pertanian. Kabupaten Konawe mempunyai beberapa sungai besar yang cukup potensial untuk pengembangan pertanian, irigasi dan pembangkit tenaga listrik seperti Sungai Konaweaha dan Sungai Lahumbuti. Sedangkan Sungai Lapoa sekarang termasuk wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Sungai Lasolo; Kokapi; Toreo; Andumowu; dan Sungai Molawe menjadi bagian wilayah Kabupaten Konawe Utara. Sungai Konaweaha mempunyai debit air $\pm 200 \text{ M}^3$ per detik. Dari sana telah dibangun bendungan air Wawotobi yang mampu mengairi sawah seluas ± 18.000 hektar. Selain sungai-sungai yang telah disebutkan di atas terdapat pula Rawa Aopa yang sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan darat.

4.3. Luas wilayah

Luas wilayah daratan Kabupaten Konawe 11.669,91 km² atau 42,43 persen dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara, sedangkan luas wilayah perairan laut (termasuk perairan Kabupaten Konawe Selatan) ± 11.960 km² atau 10,87 persen dari luas perairan Sulawesi Tenggara. Selain jazirah tenggara Pulau Sulawesi, terdapat juga pulau-pulau kecil, yaitu Wawonii, Karama, Bokori, Sponda Laut, Campada, Labengki, Bawulu, Saponda Darat dan Pulau Hari dengan potensi yang sangat menonjol, yaitu kekayaan hasil laut disamping juga memiliki panorama yang indah. Oleh karena itu perairan Kabupaten Konawe sangat cocok untuk pengembangan usaha perikanan laut dan pengembangan usaha bahari.

Permukaan tanah pada umumnya bergunung dan berbukit yang diapit dataran rendah yang sangat potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Berdasarkan garis ketinggian menurut hasil penelitian pada areal seluas 1.556.160 ha. Jenis tanah meliputi Latosol 363.380 ha atau 23,35 persen. Padzolik 438.110 ha 28,15 persen, Organosol 73.316 ha atau 4,80 persen dan tanah campuran 553.838 ha 35,59 persen.

Kabupaten Konawe mempunyai beberapa sungai besar yang cukup potensial untuk pengembangan pertanian, irigasi dan pembangkit tenaga listrik, seperti Sungai Konaweaha, Sungai Lahumbuti, Sungai Lapoa, Sungai Lasolo, Sungai Kokapi, Sungai Toreo, Sungai Andumowu dan Sungai Molawe.

Curah hujan pada tahun 2013 mencapai 2.851 mm dalam 205 hari hujan (hh) atau lebih tinggi dari tahun 2012 dengan curah hujan 1.556 mm dalam 132 hh. Secara keseluruhan, merupakan daerah bersuhu tropis. Menurut data yang diperoleh dari pangkalan udara Woltermongisidi kendari, selama tahun 2005 suhu udara maksimum 34 °C dan maksimum 15 °C atau dengan rata-rata 20 °C. Tekanan udara rata-rata 1.010,5 milibar dengan kelembaban udara rata-rata 87,7 persen. Kecepatan angin pada umumnya berjalan normal, yaitu disekitar 12,75 m/detik. (BPS Konawe Dalam Angka 2014)

4.4. Penduduk dan tenaga kerja

Penyebarannya yang tidak merata masih merupakan ciri yang paling menonjol dari penduduk Kabupaten Konawe. Hal ini ditandai dengan besarnya perbedaan kepadatan antara kecamatan satu dengan yang lainnya. Kecamatan Unaaha, Wawotobi, Wonggeduku, Uepai, dan Sampara merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan jauh diatas rata-rata, masing-masing 2,97 jiwa, 1,67 jiwa, 1,76 jiwa, 2,60 jiwa dan 1,78 jiwa per kilometer persegi. Sementara kecamatan Dari 223 727 jiwa penduduk Kabupaten Konawe pada tahun 2013, sebanyak 114 665 jiwa atau sekitar 51,25 % adalah laki-laki dan 48,75 persen atau 109 062 jiwa adalah perempuan. Berarti rasio jenis kelamin (*sex ratio*) penduduk adalah sebesar 105,1, artinya dalam setiap 205 penduduk terdapat 100 penduduk perempuan dan 105 penduduk laki-laki.

Berdasarkan data BPS tahun 2014 dan hasil sensus 2013, bahwa penduduk yang berusia 15 tahun ke atas sekitar 95,54 persen atau 107 001 jiwa, terdiri dari

angkatan kerja yang meliputi bekerja sebesar 94,97 persen dan mencari kerja sebesar 5,03 persen. Serta bukan angkatan kerja yang meliputi sekolah 18,02 persen, mengurus rumah tangga sebesar 72,27 persen dan lainnya 9,71 persen. Menurut status pekerja utama bagian terbesar penduduk adalah sebagai pekerja buruh/karyawan (27,47 persen) kemudian diikuti secara berturut-turut, yaitu usaha/pekerja dibantu buruh tidak dibayar (23,80 persen), bekerja tidak di bayar (19,98 persen) usaha atau bekerja sendiri (16,76 persen), pekerja bebas non pertanian (7,37 persen), usaha dibantu buruh dibayar (2,50 persen), dan pekerja bebas pertanian (2,12 persen).

4.5. Pertanian

Produksi padi tahun 2005 tercatat sebanyak 188.172 ton, jagung 962 ton, ubi kayu 13.456 ton atau naik 21.94 persen, ubi jalar 3.943 ton atau naik 2.18 persen, sedangkan kacang tanah 90 ton atau turun 15,34 persen. Secara umum jenis tanaman buah-buahan yang diusahakan meliputi 19 jenis tanaman. Dari 20 jenis tanaman buah-buahan yang diusahakan pada tahun 2010 – 2013 , produksinya terlihat pada tabel berikut:

Table 4.1. Jumlah produksi buah-buahan di kabupaten konawe dari tahun 2010 – 2013

No	Jenis tanaman	Produksi/tahun (kuintal)			
		2010	2011	2012	2013
1	Alpoket	40	17	16	15
2	Mangga	86 014,06	2 507	5 188	47 695
3	Rambutan	270 165,2	9 271	36 905	36 575
4	Duku/langsat	250 401,2	98	45 754	14 770
5	Jeruk	606 612,9	23 332	30 276	17 085
6	Durian	55 423,8	2 664	17 918	1 104
7	Jambu biji	5,9	489	321	1 104
8	Pepaya	40 255,3	6 150	7 463	26 797
9	Pisang	141 612,97	45 069	44 421	76 176
10	Nenas	5 151,32	401	268	1 263
11	Salak	762,3	480	396	649
12	Nangka	52 791,03	3 703	2 446	14 641
13	Sirsak	289,71	215	123	161
14	Sukun	276,4	381	263	314
15	Belimbing	8 544,27	484	263	1 723
16	Jambu Air	8 600,1	893	780	10 452
17	Melinjo	185,1	38	252	138
18	Petai	101,7	190	201	147
19	Manggis	231	-	-	-
20	Jengkol	23,8	40	87	62

Pada umumnya jenis tanaman sayur-sayuran yang diusahakan di Kabupaten Konawe hanya disajikan 17 unit tanaman yaitu: bawang daun 275,5 ton, kubis 72 ton, sawi 755,6 ton, kacang merah 30,1 ton, kacang panjang 2245,6 ton, cabe besar 757,5 ton, cabe rawit 867,8 ton, tomat 1468 ton, terong 2833 ton, buncis 575,6 ton, ketimun 950,7 ton, labu siam 558,5 ton, bayam 757,7 ton, semangka 1293,4 ton dan kangkung 1082 ton (BPS 2014)

Jenis perkebunan rakyat yang diusahakan adalah kelapa, kopi, cengke, kakao, jambu mete, kapuk, kapas, kemiri, lada, pala, vanili, pinang, enau, tembakau dan sagu. Terlihat bahwa selama tahun 2005 luas tanaman dari beberapa jenis

tanaman perkebunan rakyat yang terbesar adalah kakao seluas 18,059 ha, jambu mete seluas 15,579 ha dan kelapa seluas 9.128,7 ha, jenis tanama lainnya mempunyai luas tanaman dibawah 7000 ha. Dari sisi produksi, jenis tanaman perkebunan terbesar adalah kakao 6.618,6 ton dan kelapa sebesar 4.197 ton, jenis tanaman lainnya mempunyai produksi tanaman dibawah 3000 ton.

Populasi ternak besar dan kecil seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi pada tahun 2013 berturut-turut tercatat sebesar 29.469 ekor, 702 ekor, 3 ekor, 14.047 ekor, 0 ekor dan 18.326 ekor. Populasi unggas selama tahun 2013 tercatat sebagai berikut: ayam buras 559.251 ekor, ayam ras pedaging 31.448 ekor, ayam ras petelur 11.915 ekor dan itik manila 74.485 ekor. Jenis ternak ayam buras adalah merupakan ternak yang banyak digemari di pelihara, hal ini di sebabkan karena sistem pemeliharaan yang gampang dan harganya relative mahal bila dibandingkan dengan ayam ras pedaging, apalagi ketika mendekati hari-hari besar seperti idul fitri, idul adha, tahun baru dan lain-lain.

Jumlah armada perahu/kapal yang digunakan untuk penangkapan ikan tahun 2013 tercatat sebanyak 3.937 unit. Sebagian besar berupa perahu tidak bermotor, yaitu 53,46 persen atau 2.105 unit, jakung 1.535 unit atau 38,98 persen, motor tempel sebesar 24,38 persen atau 960 unit dan kapal motor sebesar 22,14 persen atau 872 unit serta perahu papan sebanyak 570 unit atau 14,47 persen. Produksi perikanan selama tahun 2013 yaitu untuk tambak sebesar 1.541 ton dengan nilai 18.492 juta rupiah terdiri, produksi kolam sebesar 476 ton dengan nilai rupiah 16.660

juta rupiah, dan hasil perikanan laut sebesar 249 ton dengan nilai rupiah sebesar 784 juta rupiah.

Pada tahun 2013 jumlah usaha industri kecil/kerajinan rumah tangga yang tercatat pada Dinas Perindag Kabupaten Konawe sebanyak 1.239 unit, menyerap 6.224 orang tenaga kerja yang terdiri dari 877 unit industri kecil formal dengan 5.226 orang tenaga kerja dan 359 unit industri kecil non formal dengan 906 orang tenaga kerja. Dari 1.239 unit industri kecil tersebut menghasilkan produksi sebesar 41.671,660 juta rupiah, masing-masing 40.531,66 juta rupiah dan 940 juta rupiah dari industri kecil formal dan non formal.

Nilai ekspor tahun 2013 mencapai US\$ 1.896.029,85. Sebesar US\$ 1.880.000,00 adalah hasil penjualan biji kakao dan sisanya US\$ 16.029,85 merupakan hasil perikanan dan kelautan. Jenis komoditi andalan jenis ikan tuna dan biji kakao. Jepang merupakan negara tujuan ekspor utama. Seluruh ekspor hasil perikanan/kelautan, minus ikan moradji dan kulit kerang atau sekitar US\$ 1.736.540 (63,21 persen) dari total ekspor ditujukan ke Jepang. Negara utama lainnya adalah Malaysia terutama dalam ekspor biji kakao. Nilai perdagangan antar pulau selama tahun 2013 mencapai 123.120 juta rupiah. Penghasil utama adalah dari hasil perkebunan yaitu sebesar 25.225,60 ton atau senilai 114.170,00 juta rupiah, sisanya adalah dari hasil tanaman pangan sebesar 2.402,90 ton atau senilai 8.950,00 juta rupiah. Produksi terbesar adalah kakao sebesar 11.999,10 ton atau senilai 19.300,00 juta rupiah.

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Karakteristik Demografi Respondent

Table 5.1. Rata-rata umur pendidikan, pengalaman dan pendapatan menurut jenis usaha tani

Jenis kelompok	Umur	Pendidikan	Pengalaman	Jumlah anggota	Pendapatan	Σ anggota
Kelompok tani-ternak	43,35	11,5	14,8	26	3.675.000	20
Kelompok petani sawah	42,35	12,1	16,25	23,73	3.400.000	20
Kelompok tani- kolam	39,65	10,25	12,05	27,75	3.350.000	20
Kelompok tambak	45,05	10,7	15,3	30,00	3.550.000	20

Berdasarkan table 5.1. Menunjukkan bahwa rata-rata umur untuk anggota kelompok tani-ternak adalah 43,35, hal ini menunjukkan masih tergolong usia produktif. Maka selanjutnya bahwa anggota kelompok usaha tani-ternak yang ada di kabuapten konawe dapat melakukan berbagai pekerjaan dengan baik, karena sebagian besar petaninya masih berusia produktif. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Santoso 2006, yang menyatakan bahwa umur 20 – 60 tahun merupakan umur produktif, dimana manusia mempunyai kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan baik. Selanjutnya pendidikan anggota kelompok tani-ternak juga tergolong tinggi, dimana rata-rata pendidikan formal petani adalah 11,5, atau sejajar dengan setingkat SMA. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat petani memiliki kemampuan untuk menerima inovasi baru terutama yang berkaitan dengan pengembangan kelompok dan kemitraan, hal ini sejalan dengan program pemerintah

yang mencanangkan bagi petani wajib belajar 9 tahun. Ini artinya bahwa pendidikan formal petani yang ada di Kabupaten Konawe sebagian besar sudah melewati standar dari pemerintah untuk pendidikan 9 tahun. Hal ini diyakini bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin siap seseorang untuk mengelolah usaha taninya. Demikian halnya dengan pengalaman bertani bagi anggota kelompok tani-ternak yang ada di Kabupaten Konawe. Pengalaman bertani menunjukkan bahwa rata-rata pengalaman bertani adalah 14,8 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman bertani anggota kelompok sangat tinggi. Oleh karena itu ini dinilai dapat mempengaruhi tingkat perkembangan dunia usaha pertanian atau peternakan. Semakin tinggi pengalaman bertani seseorang maka semakin tinggi pula pengetahuan seseorang terhadap usaha taninya. Rata-rata pendapatan adalah Rp 3.675.000, hal ini menunjukkan pendapatan masyarakat sudah cukup tinggi, perhitungan ini adalah pendapatan kotor bagi petani berdasarkan asumsi penghasilan kotor petani.

Demikian halnya dengan anggota kelompok tani sawah murni. Umur anggota kelompok menunjukkan umur yang baik. Hal ini dapat dilihat bahwa rata-rata umur anggota kelompok adalah 41,36 tahun. Kondisi ini menunjukkan umur yang produktif. Berdasarkan standar yang ada bahwa umur 20- 65 tahun itu merupakan umur produktif, dimana seseorang mempunyai kemampuan untuk berkeasi dan berinovasi. Pengalaman bertani bagi petani padi sawah merupakan pengalaman yang baik. Rata-rata pengalaman bertani anggota kelompok adalah 12,23, hal ini menunjukkan bahwa pengalaman bertani anggota kelompok cukup tinggi. Kondisi ini adalah salah satu factor pendukung dalam usaha tani , karena semakin tinggi

pengalaman bertani makin semakin tinggi pula pengetahuan tentang pertanian. Selanjutnya dapat dijadikan rujukan untuk mengembangkan penguatan kelompok dan pengembangan kemitraan untuk keberlanjutan usaha tani. Demikian halnya dengan pendidikan formal petani kelompok padi sawah. Rata-rata pendidikan formal anggota adalah 10,43 atau setara dengan SMA kelas satu. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan petani anggota kelompok cukup tinggi, yang mana pendidikan ini sangat mempengaruhi tingkat pemahaman petani dalam inovasi-inovasi baru. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat pengetahuannya. Selanjutnya distribusi data karakteristik demografi responden dapat dilihat pada table-tabel berikut

Tabel 5.2. Distribusi responden berdasarkan kisaran umur

Nilai Interval Umur (tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
21 – 30	4	5
31 – 40	34	42,5
41 – 50	32	40
≥ 51	10	12,5
Total	80	100

Berdasarkan table di atas bahwa sebagian besar responden bermurur antara 31 – 40 tahun yaitu sebanyak 34 orang dengan persentase 42,5%, kemudian yang berumur 41 – 50 tahun sebanyak 32 orang dengan persentase 40%, kemudian yang berumur ≥ 51 hanya berjumlah 10 orang atau 12,5%, dan persentase jumlah terkecil adalah yang berumur 21 – 30 tahun yaitu sebanyak 4 orang dengan persentase 5%. Hal ini menunjukkan bahwa umur petani yang berada di Kabupaten Konawe masih sangat produktif. Pada umur ini petani sangat siap untuk menerima semua teknologi yang akan diberikan dalam usaha taninya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian

Wibowo dan Haryadi (2006), menyatakan bahwa kisaran umur 25 sampai 65 tahun merupakan kategori umur produktif, karena sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh BPS Daerah Istimewah Yogyakarta bahwa umur 15 sampai 65 tahun merupakan kategori produktif atau kategori usia kerja. Selanjutnya semakin muda umur seseorang maka semakin mudah menerima perubahan dari luar karena petani peternak selalu ingin mencoba sesuatu yang baru sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam perubahan (*diverifikasi*) usahanya (Sonbait *et al.* , 2011).

Tabel 5.3. Distribusi responden berdasarkan jenjang pendidikan formal

Pendidikan formal	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
SD	8	10
SMP	14	17,5
SMA	50	62,5
DIII	2	2,5
S1	6	7,5
Total	80	100

Berdasarkan table 5.3. Menunjukkan bahwa jenjang pendidikan petani di Kabupaten Konawe sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat bahwa sebanyak 50 orang atau sekitar 62,5% responden mempunyai jenjang pendidikan setingkat SMA, sebanyak 14 orang atau 17,5% responden mempunyai jenjang pendidikan setingkat SMP, Strata satu (S1) sebanyak 6 orang atau 7,5%, SD sebanyak 8 orang atau 10%, dan sisanya adalah DIII (Diploma) sebanyak 2 orang atau 2,5%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan petani di Kabupaten Konawe sangat tinggi, sehingga akan memudalihkan dalam memberikan beberapa sentuhan-sentuhan teknologi terkait dengan pengembangan usahanya. Terutama dalam manajemen

pengelolaan usaha baik itu penguata kelembagaan maupun penumbuhan kemitraan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa semakin tinggi pendidikan seorang peternak maka akan diikuti dengan pola pikir yang baik. Pola pikir baik memudahkan peternak mengambil keputusan sendiri mengenai dunia usahanya. Petani dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih cepat melaksanakan adopsi inovasi, sebaliknya pendidikan yang rendah cenderung sulit melakukan inovasi yang diberikan (Suratiyah 2006).

Tabel 5.4, Distribusi responden berdasarkan kisaran pengalaman usahatani

Kisaran Pengalaman (tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase
4 – 9	12	15
10 – 16	41	51,25
17 – 22	20	25
≥ 23	7	8,75
Total	80	100,00

Pengalaman usahatani adalah merupakan kisaran waktu seseorang dalam mengelola usahatannya. Berdasarkan table 5.4. Menunjukkan bahwa kisaran pengalaman usahatani di Kabupaten Konawe sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat pada kisaran pengalaman 10 – 16 tahun sebanyak 41 orang atau sekitar 51,25%, selanjutnya sebanyak 20 orang atau sekitar 25% mempunyai pengalaman antara 17 – 22 tahun, sebanyak 12 orang atau sekitar 15% mempunyai pengalaman 4 – 9 tahun, dan sisahnya adalah sebanyak 7 orang atau sekitar 8,75% mempunyai pengalaman di atas 23 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman usahatani di Kabupaten Konawe sangat tinggi. Semakin tinggi pengalaman seseorang maka semakin tinggi pula keinginan seseorang untuk mengembangkan usahatannya,

sehingga keinginan untuk mengikuti perubahan atau inovasi-inovasi baru itu juga sangat tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa semakin lama pengalaman beternak maka pengetahuan tentang beternak yang diperoleh semakin banyak sehingga dengan pengalaman tersebut peternak dengan mudah mengatasi permasalahan atau kesulitan yang ditemui dalam beternak (Nazlah 2008). Kemudian hasil penelitian lain juga mengatakan bahwa pengalaman mempengaruhi seseorang terhadap respon yang diterima guna memutuskan sesuatu yang baru seperti inovasi dan teknologi yang berkaitan dengan usaha peternakannya sehingga seorang peternak yang kurang berpengalaman akan kurang mengetahui resiko yang terjadi dalam usaha peternakannya (Santoso 2006).

Selanjutnya distribusi pendapatan petani di kabupaten konawe cukup tinggi. Berdasarkan hasil wawancara langsung terhadap responden disajikan distribusi pendapatan kotor petani di kabupaten konawe.

Tabel 5.5. Distribusi responden berdasarkan kisaran pendapatan kotor usahatani

Kisaran pendapatan (tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase
2.000.000 - 2.900.000	12	15
3.000.000 - 3.900.000	40	50,00
4.000.000 – 4.900.000	18	22,5
≥ 5.000.000	10	12,5
Total	80	100,00

Berdasarkan table 5.5. Menunjukkan bahwa kisaran pendapatan petani di kabupaten konawe berada antara Rp 3.000.000 – 3.900.000 yaitu sebanyak 40

orang atau sekitar 50%, selanjutnya sebanyak 18 orang atau 22,5% berpendapatan sebesar Rp 4.000.000 - 4.900.000, kemudian beturut berpendapatan Rp 2.000.000 – 2.900.000 sebanyak 12 orang atau sekitar 15%, dan yang berpendapatan di atas Rp 5 000.000 adalah sebanyak 10 orang atau sekitar 12,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan petani di kabupaten konawe cukup besar. Namun hasil perhitungan ini merupakan hasil perhitungan pendatan kotor yaitu pedatanan yang terjual dan tidak terjual.

5.2. Karakteristik Bentuk Usahatani Responden

5.2.1. Bentuk usahatani dan kelembagaan

Berdasarkan penjelasan di atas terkait dengan kondisi karakteristik demografi responden menunjukkan bahwa manunjukkan karakteristik yang baik, mulai dari umur yang produktif, pengalaman bertani yang tinggi dan pendidikan yang tinggi sehingga diyakini juga akan meningkatkan usaha taninya. Lebih lanjut juga dapat kita liat dari kondisi karakteristik bentuk usahatani responden. Bentuk usaha tani yang berkembang di Kabupaten Konawe sudah menunjukan bentuk usahatani yang baik yaitu dalam bentuk kelompok tani. Bentuk kelompok usaha tani yang terbentuk cukup beraneka ragam sesuai dengan usaha tani yang diusahakan. Kelompok usaha tani yang ada di Kabupaten Konawe terdiri dari :

1. Bentuk kelompok petani sawah

Kelompok petani sawah ini adalah kelompok yang usahanya adalah hanya padi sawah. Dalam perkembangannya kelompok ini beranggotakan 20 orang. Kelompok ini sudah menerapkan system pengolahan secara kelompok. Ketua

kelompok memiliki mesin penggiling khusus untuk anggota kelompok dengan tarif lebih murah.

Berdasarkan hasil pengamatan beberapa lokasi sampling mempunyai potensi untuk budidaya persawahan. Data potensi persawahan dapat di lihat pada table berikut:

Table 5.6. Potensi lahan persawahan berdasarkan kecamatan sampling

No	Kecamatan	Luas lahan sawah (Ha)	Persentase (%)
1	Anggaberu	2.027	3,93
2	Uepai	3.015	5,85
3	Wonggeduku	9.475	18,39
4	Kapoiala	346	0,67
	Total	14.863	28,84

Berdasarkan table 5.6. Menunjukkan bahwa kecamatan wonggeduku merupakan kecamatan dengan potensi yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari data BPS 2014 dan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa luas lahan persawahan di kecamatan wonggeduku adalah sebesar 9.475 Ha atau 18,39% dari total luas sawah di kabupaten konawe. Selanjutnya kecamatan uepai dengan luas 3.015, kecamatan anggaberu 2.027 dan kecamatan kapoiala seluas 346 Ha. Kecamatan wonggeduku adalah merupakan lokasi dengan penghasil padi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari hasil panen sawah setiap tahunnya yang di tampilkan pada table berikut ini.

Table 5.7. Realisasi panen padi sawah berdasarkan kecamatan

No	Kecamatan	Luas panen sawah (Ha)	Persentase (%)
1	Anggaberu	1.461	2,87
2	Uepai	3.408	5,99
3	Wonggeduku	9.219	18,14
4	Kapoiata	321	0,63
	Total	14.409	27,63

Berdasarkan table 5.7. Menunjukkan bahwa realisasi panen padi sawah kecamatan wonggeduku adalah sebesar 9.219 Ha, atau sekitar 18,14% dari total realisasi panen padi sawah kabupaten konawe. Hal ini menunjukkan bahwa kecamatan ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan menunjukan bahwa kecamatan ini sudah cukup maju dalam bidang pengembangan padi sawah, akan tetapi masih terkendala pada proses manajemennya, terutama dalam kelembagaan dan kemitraan.

2. Bentuk kelompok petani sawah terintegrasi dengan kolam

Kelompok petani sawah dan kolam ini merupakan kelompok integrasi. Secara umum sebenarnya kelompok ini sudah menunjukan kemajuan. Masyarakat di Kabupaten Konawe sudah mengadopsi cara-cara baik dalam bertani. Namun dalam perkembangannya masi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan penguatan kelompok dan penunmbuhan kemitraan sehingga usaha tani dapat berkelanjutan. Seperti kelompok mitra karya lestari adalah salah satu kelompok yang menerapkan system ini, kelompok ini beranggotakan 24 orang yang kesemuanya di koordinir oleh satu ketua kelompok. Berdasarkan potensi

perikanan terdapat beberapa kecamatan yang memiliki wilayah yang sangat potensial untuk pengembangan perikanan baik budidaya kolam maupun budidaya tambak. Potensi wilayah tersebut dapat dilihat pada table berikut.

Table 5.8. Potensi wilayah perikanan berdasarkan kecamatan

No	Kecamatan	Lahan Budidaya kolam (Ha)	Lahan Budidaya tambak (Ha)
1	Anggaberu	218	-
2	Uepai	212	-
3	Wonggeduku	281	-
4	Kapoiala	-	2.874
	Total	711	2.874

Berdasarkan table 5.8. Menunjukkan bahwa kecamatan kapoiala merupakan kecamatan yang mempunyai potensi yang sangat besar untuk pengembangan perikanan. Hal ini dapat dilihat bahwa seluas 2.874 Ha merupakan lokasi untuk pengembangan tambak. Selanjutnya dikecamatan kapoiala juga sudah terbentuk kelompok sebanyak 29 kelompok petani tambak. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan bahwa kelompok yang terbentuk belum berjalan dengan maksimal. Sebagian kelompok struktur organisasinya tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara salah satu responden menyatakan bahwa partisipasi anggota kelompok terhadap kelompok usahatani masih sangat kurang. Hal ini di sebabkan karena pemahanan anggota kelompok terhadap kontribusi kelompok terhadap pengembangan usahatannya masih rendah.

Selanjutnya kecamatan anggaberu memiliki potensi wilayah perikanan untuk budidaya perikanan kolam adalah seluas 218 ha, kecamatan wonggeduku seluas 212 ha, dan kecamatan uepai seluas 281 ha. Hal ini menunjukkan bahwa di

masing-masing kecamatan memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan perikanan terutama di kecamatan kapoiala.

3. Bentuk kelompok petani sawah terintegrasi dengan ternak.

Selain kelompok petani sawah-tambak ada juga kelompok petani sawah-ternak. Berdasarkan hasil survey dilapangan model kelompok integrasi ini merupakan kelompok yang banyak diikuti oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan responden bahwa terdapat 5 kelompok yang menerapkan integrasi antara padi sawah dan ternak yaitu terdiri dari kelompok karya sejahtera, kelompok tirta sari, kelompok tunas mekar, kelompok kerta sari, dan kelompok dewi sari. Kesemuanya itu adalah kelompok yang mengusahakan ternak sebagai integrasi dari usaha padi sawahnya. Dalam perkembangannya kelompok tani-ternak ini terdiri dari dua jenis ternak yang diusahakan, yaitu kelompok tani-ternak besar dan kelompok tani-ternak unggas. Yang lebih menarik dalam bentuk kelompok ini adalah kelompok tani sawah dan ternak unggas. Berdasarkan hasil wawancara dilapangan bahwa mereka mengusahakan ayam buras sebagai integrasi dari usahataniannya. Model yang dibangun dalam kelompok ini adalah system mitra inti-plasma. Ketua kelompok memelihara induk ayam buras sebanyak 250 ekor, selanjutnya memelihara dan membiarkan bertelur dan dibiarkan menetas secara alami. Setelah kurung waktu 2 bulan setelah pasca menetas makan induknya di barkan bertelur lagi dan anaknya dijual ke anggotanya dengan harga murah untuk ditenakkan juga. Selain itu mereka sudah membuat model breeding house yang dibangun untuk menyimpan/memisahkan doc dengan induknya sehingga induknya cepat bertelur

kembali. Model kelompok ini adalah salah satu kelompok yang menjadi kekuatan bagi masyarakat di Kabupaten Konawe untuk bagaimana menumbuhkan kemitraan yang dapat membantu masyarakatnya dalam mengembangkan usahanya dan untuk penguatan kelompok tani-tenak sehingga tetap berkelanjutan.

Tabel 5.9. Potensi ternak berdasarkan jenis ternaknya

No	Kecamatan	Jenis ternak		
		Sapi	Kambing	Unggas
1	Anggaberri	1762	314	47.070
2	Uepai	2416	467	34.539
3	Wonggeduku	992	2398	114.224
4	Kapoiata	291	294	2.835
	Total	5.461	3.473	198.668

Berdasarkan table di atas menunjukkan bahwa kecamatan wonggeduku adalah merupakan daerah yang mempunyai potensi untuk pengembangan peternakan, hal ini dapat dilihat bahwa kecamatan wonggeduku terdapat 2416 ekor ternak sapi, 476 ekor kambing, dan 114.224 ekor ternak unggas. Dengan demikian untuk menunjang pengembangan peternakan makan harus didukung dengan penguatan kelembagaan yang kuat. Berdasarkan data BPS kabupaten konawe menunjukana bahwa kelompok usahatani di kecamatan wonggeduku masih didominasi oleh kelompok padi sawah. Untuk menunjang keberlanjutan usaha ternak harus dapat di integrasikan antara kelompok usahatani padisawah dengan kelompok ternak.

4. Bentuk kelompok budidaya perikanan

Selain bentuk kelompok yang seperti disajikan di atas ada juga bentuk kelompok lain yang ada di daerah pesisir. Kelompok ini adalah kelompok yang mengusahakan model karamba. Berdasarkan table 5.8 menunjukkan bahwa kecamatan kapoiala merupakan lokasi dengan potensi untuk pengembangan budidaya perikanan khususnya petani tambak yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat sebesar 2.874 Ha di kecamatan kapoiala merupakan lokasi untuk pengembangan tambak. Kecamatan kapoiala juga didukung dengan keberadaan kelompok tambak yang sangat besar, berdasarkan table menunjukkan bahwa kecamatan kapoiala memiliki kelompok tambak sebanyak 22 kelompok yang terdiri dari 11 kelompok pemula dan 11 kelompok madya. Dengan demikian maka diyakini bahwa pengembangan budidaya perikanan di kecamatan kapoiala potensial untuk dikembangkan, dengan memperkuat keberadaan kelompok atau kelembagaan sebagai penopang keberlanjutan usahatani.

5.3. Penumbuhan kemitraan dan penguatan kelembagaan petani

Berikut adalah bentuk kelompok-kelompok usahatani yang telah terbentuk di kabupaten konawe berdasarkan lokasi sampling.

Table. 5.10. Distribusi jumlah kelompok berdasarkan jenis kelompok Kecamatan Kapoiala

No	Jenis kelompok	Kelas kelompok		
		Pemula	Lanjut	Madya
1	Kelompok tambak	11	11	-
2	Kelompok nelayan	4	-	-
3	Kelompok pengasapan	3	1	-
4	Kelompok kehutanan	2	2	-
5	Kelompok perkebunan	8	1	-
6	Tanaman pangan	6	-	-
	Total	35	15	

Berdasarkan table di atas menunjukkan bahwa jumlah kelompok yang terbentuk di kecamatan Kapoiala adalah sebanyak 50 kelompok, terdiri dari 35 kelompok pemula dan 15 kelompok lanjutan. Kelompok yang terbentuk di dominasi oleh kelompok pemula artinya secara kelembagaan kekuatan kelompok masih belum maksimal. Secara garis besar dapat diasumsikan bahwa hampir semua masyarakat di kecamatan kapoiala baru membentuk kelompok dalam menjalankan usahatani, padahal dapat kita ketahui bahwa dengan kelompok yang kuat maka usaha taninya akan berkembang dengan sangat baik. Hal ini dapat kita lihat juga bahwa kelompok yang terbentuk terdiri dari kelompok tambak yaitu sebanyak 11 kelompok pemula dan 11 kelompok lanjut, kelompok nelayan sebanyak 4 kelompok pemula, kelompok pengasapan ikan terdiri dari 3 kelompok pemula dan 1 kelompok lanjut, kelompok kehutanan terdiri dari 2 kelompok pemula dan 2 kelompok lanjut, kelompok perkebunan terdiri dari 8 kelompok pemula dan 1 kelompok lanjut, serta kelompok tanaman pangan terdiri dari 6 kelompok pemula. Hal ini menunjukkan di kecamatan kapoiala mempunyai potensi untuk penguatan kelembagaan dari masing-masing jenis usahatani sehingga dapat menjadi daerah penghasil pangan yang baik.

Kemudian selain itu juga di kecamatan anggaberu merupakan daerah dengan jumlah anggota kelompok sebanyak 60 kelompok, selanjtnya distribusi masing-masing kelompok dapat dilihat pada table berikut

Table 5.11. Distribusi jumlah kelompok berdasarkan jenis kelompok kecamatan Anggaberri

No	Jenis kelompok	Kelas kelompok		
		Pemula	Lanjut	Madya
1	Kelompok padi sawah	21	19	-
2	Kelompok perikanan	8	-	-
3	Kelompok kehutanan	8	-	-
4	Kelompok kakao	3	1	-
	Total	40	20	-

Berdasarkan table di atas menunjukkan bahwa kecamatan anggaberri merupakan kecamatan dengan jumlah kelompok padi sawah yang banyak. Hal ini dapat dilihat sebanyak 40 kelompok yang terdiri dari 21 kelompok pemula dan 19 kelompok lanjut. Kelompok perikanan terdiri dari 8 kelompok pemula, kelompok kehutanan juga memiliki 8 kelompok pemula, serta kelompok kakao yang terdiri dari 3 kelompok pemula dan 1 kelompok lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa kecamatan anggaberri memiliki potensi untuk pengembangan persawahan melalui penguatan kelembagaan, sehingga kelompok ini dapat menjadi kelompok madya. Selanjutnya berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa kecamatan ini mempunyai potensi untuk dikembangkan integrasi usahatani antara petani sawah dengan perikanan karena sebagian masyarakatnya juga menggembari usaha perikanan.

Selain kecamatan anggaberri yang mempunyai potensi yang sangat besar untuk pengembangan padi sawah adalah kecamatan wonggeduku. Distribusi jumlah kelompok padi sawah dapat dilihat pada table berikut

Table 5.12. Distribusi jumlah kelompok berdasarkan jenis kelompok Kecamatan Wonggeduku

No	Jenis kelompok	Kelas kelompok		
		Pemula	Lanjut	Madya
1	Kelompok padi Sawah	144	-	-
	Total	144	-	-

Berdasarkan table di atas menunjukkan bahwa kecamatan wonggeduku merupakan kecamatan dengan jumlah kelompok padi sawah yang terbesar di kecamatan konawe. Akan tetapi dari semua kelompok yang terbentuk masih bentuk kelompok pemula. Hal ini dapat dilihat dari 144 kelompok usahatani padi sawah kesemuanya adalah kelompok pemula. Hal ini membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah mengenai strategi-strategi dalam penguatan kelompok, sehingga daerah ini dapat menjadi sentral penghasil beras di provinsi Sulawesi tenggara dan bahkan Indonesia. Hal ini juga dapat dicapai dengan penumbuhan kemitraan yang dapat menjalin kerjasama dengan petani di kecamatan wonggeduku dalam hal sarana dan prasarana dalam pertanian, serta ditopang dengan kelembagaan yang kuat sehingga keberadaan kelompok usahatani tersebut dapat berkembang dan berkelanjutan.

Kelain itu kecamatan uepai juga banyak memiliki kelompok-kelompok usahatani yang sudah terbentuk. Hal ini dapat di lihat pada table berikut.

Tabel 5.13. Distribusi jumlah kelompok berdasarkan jenis kelompok Kecamatan Uepai

No	Jenis kelompok	Kelas kelompok		
		Pemula	Lanjut	Madya
1	Kelompok padi sawah	28	33	-
2	Kelompok ternak	3	-	-
3	Kelompok hortikultura	3	-	-
4	Kelompok kakao	12	11	-
5	Kelompok jagung	1	-	-
	Total	47	34	-

Berdasarkan table di atas menunjukkan bahwa kecamatan uepai merupakan kecamatan dengan banyak potensi berdasarkan kelompok usahatani. Kelompok yang ada di kecamatan uepai adalah sebanyak 81 kelompok usahatani. Terdiri dari kelompok padi sawah sebanyak 61 kelompok, terbagi dari 28 kelompok pemula dan 33 kelompok lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok padi sawah di kecamatan uepai sudah lama digeluti. Hal ini merupakan kekuatan bagi pemerintah dalam mengembangkan usahatani padi sawah di kecamatan uepai. Selanjutnya kelompok ternak terdiri dari 3 kelompok pemula, kelompok tanaman hortikultura sebanyak 3 kelompok pemula, kelompok petani kakao sebanyak 23 kelompok terdiri dari 12 kelompok pemula dan 11 kelompok lanjut, dan kelompok jagung yang terdiri 1 kelompok pemula. Hal ini menunjukkan bahwa di kecamatan uepai dapat dikembangkan kelompok usahatani padi sawah terintegrasi dengan peternakan. Ini merupakan kekuatan bagi pemerintah dalam mengembangkan komoditi peternakan karena pakan ternak dapat memanfaatkan limbah hasil pertanian sehingga akan berjalan usahatani yang baik dan berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kelompok usahatani yang terbentuk di kabupaten konawe adalah kelompok pemula. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya penguatan kelembagaan dalam semua jenis usaha. Sehingga bentuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat dapat tumbuh dan berkelanjutan dengan di topang dengan kelembagaan yang kuat.

5.4. Inventarisasi dan pembobotan factor-faktor strategi lingkungan eksternal

Factor-factor strategi lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap penumbuhan kemitraan dan penguatan kelembagaan petani dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Konawe terdiri dari peluang (opportunities) dan ancaman (threats) . factor-faktor yang menjadi peluang adalah : 1) kebijakan pemerintah, 2) kesempatan kerja dan berusaha, 3) peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat 4) permintaan pasar, 5) terbentuk kelompok usahatani, 6) tuntutan standar mutu, 7) investasi dan peranan swasta, 8) keberadaan lembaga penelitian dan pengembangan pertanian terpadu, 9) harga beli dolog yang tinggi.

Sementara factor-faktor yang menjadi ancaman pada penumbuhan kemitraan dan penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Konawe meliputi ; 1) partisipasi masyarakat rendah, 2) hama dan penyakit, 3) flutuasi harga hasil pertanian dan peternakan serta perikanan, 4) bunga kredit bank yang tinggi, 5) perdagangan global, 6) kelembagaan yang tidak kuat, 7) degradasi sumberdaya alam, 8) keberpihakan

lembaga bank, 9) kurangnya peran P3K dalam penumbuhan kemitraan dan penguatan kelembagaan.

Dari hasil perhitungan pembobotan terhadap factor-faktor strategi lingkungan eksternal, secara berurutan mulai dari factor strategi eksternal dengan skor bobot tinggi hingga yang terendah disajikan pada table 5.14.

Table 5.14. Urutan skor bobot fakro-faktor strategi eksternal.

No	Factor-faktor strategi lingkungan eksternal	Skor bobot
	Peluang	
1	Kebijakan pemerintah mengenuai usahatani sawah,ternak dan perikanan	0.091
2	Kesempatan kerja dan berusahatani	0.072
3	Peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah	0.071
4	Permintaan pasar	0.070
5	Terbentuk kelompok usahatani	0.065
6	Tuntutan standar mutu	0.059
7	Investasi dan peranan swasta (BP4S)	0.052
8	Keberadaan lembaga penelitian dan pengembangan pertanian terpadu	0.051
	Ancaman	
9	partisipasi masyarakat rendah	0.060
10	hama dan penyakit	0.053
11	flutuasi harga hasil pertanian dan peternakan serta perikanan	0.064
12	Berkembangnya lembaga pengkreditan tradisional	0.062
13	perdagangan global	0.063
14	kelembagaan atau kelompok yang tidak kuat	0.058
15	degradasi sumberdaya alam	0.055
16	keberpihakan lembaga bank	0,054

Penjelasan masing-masing factor strategi eksternal tersebut secara rinci sebagai berikut :

1. Peluang

a. Kebijakan pemerintah

Dukungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka penumbuhan kemitraan dan penguatan kelembagaan dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Konawe sangat tinggi. Berbagai bantuan dalam rangka mendukung pembentukan kelompok tani sawah, kelompok usaha tani-ternak dan kelompok usaha tani-tambak sangat banyak diberikan kepada masyarakat. Kajian mengenai potensi pertanian di Kabupaten Konawe terus dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian yang berja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara. Selain itu pemerintah daerah konawe juga memberikan beberapa pelatihan-pelatihan terkait dengan peningkatan keterampilan bagi masyarakat dalam mengelola dunia usahanya khususnya dibidang pertanian, peternakan dan perikanan. Selanjutnya pemerintah juga terus melakukan beberapa kajian yang dapat mendukung keberlanjutan kelompok usaha tani di Kabupaten Konawe. Selain itu sekarang sudah mulai dikembangkan model pertanian terpadu atau terintegrasi antara padi sawah dengan ternak, padi sawah dengan perikanan dan padisawah, ternak dan perikanan.

b. Kesempatan kerja dan berusaha

Dalam pengembangan kelompok dan penumbuhan kemitraan secara terpadu di Kabupaten Konawe terbukti telah memberikan peluang dan kesempatan kerja serta berusaha bagi masyarakat luas terutama masyarakat tani. Pada sub penyediaan sarana dan prasarana memungkinkan tumbuh dan berkembangnya berbagai kegiatan investasi yang mampu memberikan kesempatan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Seperti halnya penumbuhan kemitraan, masyarakat dapat bekerja sama dengan pedagang, atau dengan sesama petani lainnya dalam membentuk pola kemitraan yang saling menguntungkan. Masyarakat dapat mengembangkan beberapa pola kemitraan agribisnis komoditas hortikultura seperti Pola Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA), Pola Inti-Plasma, Pola Kerjasama Pengembangan STA, pola kerjasama dalam penyediaan modal melalui kelembagaan Koperasi Serba Usaha (KSU) dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), sistem kontrak pengadaan produk hortikultura melalui *supplier* dan pola dagang umum. Kesemuanya itu dapat dikembangkan seiring dengan keberadaan kelompok usaha tani yang ada dimasyarakat. Keberhasilan penumbuhan kemitraan diharapkan dapat memberikan peluang dan kesempatan hadirnya masyarakat-masyarakat lain dalam mengembangkan pola kemitraan tersebut sehingga membuka peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat.

c. Peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat

Penguatan kelompok dan penumbuhan kemitraan pada usaha tani yang ada di Kabupaten Konawe dapat memberikan efek yang positif dalam dunia pertanian dan peternakannya. Dengan model kemitraan dan kelembagaan yang kuat akan meningkatkan pendapat bagi masyarakat tani, karena hasil pertaniannya akan terjual dengan harga yang relative sehat, dan akan meminimalisir biaya produksi pertanian dan peternakan. Dengan kelembagaan yang kuat dan kemitraan yang sesuai akan meningkatkan hasil pendapatan petani dalam hal pemasaran karena akan terhindar dari permainan harga yang dilakukan oleh pedagang (tengkulak). Selanjutnya dengan keberadaan lembaga yang kuat akan menjadikan usahatani masyarakat dapat dikelola dengan optimal, sehingga keberlanjutan model pertanian terpadu atau terintegrasi dapat berjalan dengan baik.

d. Permintaan pasar

Hasil pertanian dalam hal ini beras, hasil peternakan dalam hal ini daging dan telur, serta hasil perikanan dewasa ini sangat tinggi permintaannya. Namun seiring dengan perkembangannya permintaan tidak diikuti dengan hasil produksi yang maksimal dari petani dan peternak. Hal ini lebih disebabkan oleh sistem pertanian atau peternakan yang dilakukan oleh masyarakat masih tradisional. Dengan kondisi tersebut, permintaan pasar akan pertanian, peternakan dan perikanan itu sangat tinggi.

Dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap hasil pertanian yang semakin tinggi harus didukung oleh model pertanian yang optimal. Untuk itu penguatan kelembagaan pertanian dan penumbuhan kelembagaan menjadi factor penting dalam rangka meningkatkan hasil produksi pertanian. Dengan kelembagaan yang kuat dan model kemitraan yang baik akan merangsang terbentuknya model pertanian yang baik sehingga akan menghasilkan produksi yang optimal. Sehingga dengan permintaan yang tinggi terhadap hasil pertanian ini maka diperlukan penguatan kelembagaan dan penumbuhan kemitraan dalam dunia usaha tani agar manajemen dalam pengelolaan pertanian bias berjalan dengan baik dan akan meningkatkan produksi dari hasil pertanian, peternakan dan perikanan.

Semakin meningkatnya populasi penduduk dan kesejahteraan masyarakat, menyebabkan bertambahnya konsumsi masyarakat terhadap prodak-prodak pertanian, peternakan dan perikanan. Dengan demikian kebutuhan masyarakat menjadi sangat besar karena kecenderungan permintaan pasar global yang terus meningkat, khususnya di Kabupaten Konawe. Olehnya itu dengan kondisi yang demikian menuntut pemerintah harus berinisiatif untuk mendukung peningkatan produksi pertanian tersebut dalam rangka mendukung ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah. Salah satu bentuk dukungan yang bias dilakukan adalah munumbuhkan model usaha tani dengan kemitraan serta penguatan lembaga dalam hal ini

kelompok usaha tani agar masyarakat dapat mengelolah atau mememanajemen usahanya dengan baik dan benar dan akan mengoptimalkan hasil produksinya.

e. Terbentuk kelompok usahatani

Keberadaan kelembagaan dalam usahatani menjadi factor penting dalam mendukung keberlanjutannya. Kelompok usahatani merupakan penopang dalam pengelolaan usaha tani. Keanekaragaman model usahatani dimasyarakat harus ditopang dengan manajemen yang baik, sehingga usaha pertanian dapat berkembang. Ada beberapa kelompok usahatani yang terbentuk yaitu; 1) kelompok usaha tani padi sawah, 2) kelompok usahatani pagi-ternak, 3) kelompok usahatani padi-ternak-tambak, dan 4) kelompok usaha tani tambak. Hal ini merupakan salah satu fator peluang yang bias dijadikan acuan untuk menumbuhkan kemitraan dan penguatan kelembagaan tersebut dalam rangkan mendukung swasembada panga di Kabupaten Konawe. Olehnya itu pengembangan pertanian diKabupaten Konawe dalam rangka ketahanan pangan akan berhasil karena dukungan dan keberadaan kelompok usahatani tersebut.

f. Tuntutan standar mutu

Tuntutan terhadap mutu produk pertanian baik dalam daerah maupun luar daerah pada era globalisasi ini. Pada era perdagangan yang bebas dan ketat ini dituntut hasil prodak pertanian dalam negri memiliki mutu yang baik untuk dapat bersaing dengan prodak pertanian dari luar.

Sulawesi tenggara khususnya Kabupaten Konawe masih relative rendah. Oleh karena itu petani dituntut untuk dapat menghasilkan prodak yang berkualitas baik. Dalam rangka memenuhi standar tersebut maka petani dan peternak harus memperoleh bibit-bibit yang berkualitas pula. Selain itu harus ditopang dengan kelembagaan yang baik agar manajemen pengelolaan usahatani dapat berjalan dengan baik. Dapat diketahui bahwa kesalahan dalam manajemen pengelolaan dapat menurunkan kualitas prodak khususnya dalam bidang peternakan. Untuk itu penumbuhan kemitraan dalam rangka menghasilkan bibit-bibit yang baik dapat dikembangkan sehingga akan menghasilkan prodak yang berkualitas dan dapat memenuhi standar baku mutu nasional.

Dewasa ini dapat kita jumpai dengan mudah prodak-prodak pertanian dari luar negeri seperti halnya prodak buah-buahan dan bahkan daging dan telur. Seiring dengan perdagangan bebas yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) masyarakat harus menghasilkan prodak dengan baku mutu yang tinggi. Olehnya itu seluruh stakeholder terkait harus memperhatikan masyarakat petani dalam hal mengelolah usahanya dan serta harus dibarengi dengan mitra-mitra baik dari pemerintah maupun dari swasta yang dapat mendukung perkembangan usahatani.

g. Investasi/kemitraan dan peranan swasta

Masih luasnya ketersediaan lahan potensi untuk pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan, peluang untuk mengembangkan

pertanian dan peternakan itu sangat baik dalam rangka menjawab permintaan pangsa pasar yang semakin tinggi. Selain itu dapat menarik perhatian beberapa investor untuk menanamkan modalnya. Dibidang perluasan areal yang diikuti dengan industry pengolahan dan perdagangannya memungkinkan tumbuh dan berkembangannya kegiatan kemitraan dan kelembagaan pertanian di Kabupaten Konawe.

Kehadiran investor dalam hal ini mitra diharapkan dapat memberikan bantuan pinjaman permodalan pada petani dan peternak dengan tingkat bunga yang layak. Bantuan permodalan tersebut dapat digunakan oleh petani dan peternak serta petani tambak dalam hal untuk perluasan areal budidayanya dengan perعتakan sawah, pembuatan kandang pernak unggas, penambah petak tambak, bantuan bibit, obat-obatan, bantuan ternak sapi, pengolahan pasca panen, sehingga menghasilkan produk pertanian dan peternakan yang bermutu dan produktivitas yang tinggi. Selain itu keberadaan investor/mitra dapat membantu masyarakat petani dan peternak dalam memasarkan hasil pertaniannya dengan harga yang layak.

h. Keberadaan lembaga penelitian dan pengembangan pertanian terpadu

Berdasarkan pada kondisi setiap wilayah yang menghadapi persaingan global dengan daerah dan wilayah lain, dapat mempengaruhi berbagai aspek pemanfaatan sumberdaya alam dalam hal ini pertanian, peternakan

dan perikanan. Sehingga akan terjadi persaingan yang semakin kompetitif.

Agar suatu daerah mampu bersaing dengan perdagangan daerah lain, maka produk-produk hasil pertanian dan peternakan harus memenuhi standart mutu nasional dan bahkan internasional. Tuntutan pasar mengharuskan usaha produksi dilakukan secara standard an efisien yang ditetapkan. Untuk mencapai kualitas produksi sesuai dengan standar yang diharapkan harus didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Untuk itu dalam perkembangannya usaha tani harus selalu didukung dengan lembaga-lembaga yang dapat menghasilkan dan bahkan menguji hasil produk pertanian sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Keberadaan lembaga penelitian dan pengembangan kelembagaan dan penumbuhan kemitraan dapat meningkatkan hasil produk pertanian yang sesuai dengan standar. Lembaga ini akan memiliki kontribusi yang besar/signifikan dalam alih teknologi untuk pengembangan marikultur serta pengolahan sumberdaya pertanian dan peternakan. Lembaga pendidikan dan penelitian sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan program pengembangan pertanian memiliki fungsi dalam peningkatan sumberdaya manusia melalui pelatihan-pelatihan bagi masyarakat petani, memberikan informasi tentang teknologi yang berkaitan dengan pertanian dan peternakan hasil penelitian. Selain itu juga membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan dan konsep program-program kegiatan

pengembangan pertanian dan peternakan yang lebih modern dan berkelanjutan, serta membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengembangan peternakan dan pertanian terutama dalam hal penguatan kelembagaan dan penumbuhan model kemitraan yang dapat mendukung usahatani yang ada di Kabupaten Konawe.

Memalui kegiatan pelatihan dan pengembangan kemitraan dan penguatan lembaga/kelompok, petani dapat lebih mendalam memahasi model usaha tani yang dikembangkan dan dapat menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan standar baku mutu nasional dan bahkan internasional. Lembaga-lembaga ini juga dapat mengkaji lebih mendalam mengenai aspek-aspek peting yang menunjang keberhasilan, mulai dari kesesuaian lahan dan tanaman yang akan ditanam, tehnik-tehnik budidaya peternakan yang baik dan benar, permodalan dan sistem tatniaga yang dapat dibangun.

i. Harga beli dolog dikalangan petani yang tinggi

Dolog sebagai perusahaan BMN sebagai salah satu mitra petani di Kabupaten Konawe saat ini membeli hasil pertanian dalam hal ini beras dengan standar harga yang tinggi. Dolog telah bekerja sama dengan gapoktan yang ada di kabupaten konawe dengan sistem kontrak. Kondisi ini tentunya menjadi peluang bagi petani untuk mengembangkan usahatannya khususnya di bidang persawahaan. Sehingga petani tidak kesulitan dalam mencari pemasaran hasil usahatannya. Pemerintah sebagai fasilitator dapat membuatkan MoU antara dolog dan gapoktan

yang ada di Konawe untuk melakukan kerja saja sehingga kedua belah pihak legal secara hukum.

2. Ancaman

a. Perdagangan global

Perdagangan globalisasi dapat menjadi ancaman bagi masa depan pertanian di Indonesia khususnya Sulawesi Tenggara Kabupaten Konawe. Pada era MEA sekarang ini, hasil-hasil pertanian dari negara lain dengan mudah kita jumpai dipasar-pasar modern kita dan bahkan pasar tradisional yang ada di Indonesia. Ini mengharuskan petani menjadi takut, karena persoalan mutu hasil pertanian yang tentunya kalah bersaing dengan produk luar negeri. Oleh karena itu pemerintah harus jeli melihat persoalan ini karena apabila terus dibiarkan maka petani kita tidak bias menjual hasil produknnya. Oleh karena itu penguatan kelembagaan diharuskan untuk segera dilakukan agar memudahkan lembaga-lembaga penelitian dalam mengontrol dan mengevaluasi hasil-hasil pertanian. Selain itu juga penumbuhan kemitraan dalam lingkup petani sangat penting dilakukan untuk dapat menghasilkan dan mendapatkan bibit-bibit yang baik dalam mengelolah usahatannya.

Kabupaten Konawe dengan segala potensi pengembangan kawasan pertanian yang masih baik serta didukung oleh ketersediaan tenaga kerja yang masih produktif, memungkinkan hadirnya investor/mitra untuk mengembangkan budidaya pertanian, peternakan dan perikanan mejadi cukup besar untuk dikembangkan. Hal ini dapat terus dilakukan dengan

untuk membantu masyarakat petani dalam mengembangkan usahataniannya.

Dapat kita ketahui bahwa pangsa pasar kitaa sekarang telah banyak dikuasai oleh pedagang-pedagang asing. Hal ini cukup memprihatikkan karena petani kita tidak bias bersaing dengan pedagang-pedagang asing. Untuk itu diperlukan manajemen yang baik untuk mengelolah pertanian sehingga dapat menghasilkan prodak-prodak yang dapat bersaing dengan pradak-pradak yang dihasilkan oleh pedagang asing.

Era globalisasi perdagangan diwali dengan adanya kesepakatan kawasan bebas regional ASEAN (AFTA) yang dimulai tahun 2003, kemudian diikuti dengan kesepakatan untuk Kawasan Asia Pasifik (APEC) pada tahun 2010, selanjutnya pada tahun 2020 seluruh anggota WTO yang telah menandatangani perjanjian GATT termasuk Indonesia harus menjalani era global yang penuh tantangan. Kemudia pada tahun 2014 pemerintah juga telah menyepakakan perdagangan bebas yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besarnya peluang bagi masyarakat asing untuk menjual hasil-hasil pertanian dan peternakannya di Indonesia.

b. Fluktuasi harga

Terjadinya fluktuasi harga hasil pertanian dan peternakan di pasar local dan bahkan pasar dunia sangat mempengaruhi nilai transaksi sampai ketinggian petani/peternak/nelayan. Harga jual yang disepakati oleh petani

dengan pedagang pengumpul atau biasa dikenal dengan istilah tengkulak, berpedoman pada informasi dari pedagang antar pulau/eksportir dengan standar harga terendah yang terjadi dipasar dunia. Kebijakan eksportir ini untuk menekan resiko kerugian terhadap fluktuasi harga hasil pertanian, peternakan dan perikanan di pasar dunia. Hal tersebut mengakibatkan tingkat harga yang diterima oleh petani menjadi lebih rendah.

Kondisi fukuasi harga belum dapat dimanfaatkan oleh petani kita untuk memperoleh margin harga yang lebih tinggi. Beberapa penyebab antara lain adalah terbatasnya pengetahuan tentang manajemen dalam hal ini kelembagaan yang ada di kalangan petani kita, terbatasnya informasi terhadap harga pasaran yang dikarenakan tidak adanya kemitraan yang terbangun pada masyarakat petani kita sehingga masyarakat mengelolah secara mandiri, terbatasnya tempat penyimpanan yang dimiliki oleh petani yang dapat menjaga kualitas prodaknya, serta banyaknya kebutuhan yang mendesak sehingga petani segera menjual hasilnya. Hal ini dikarenek kelembagaan yang kurang berjalan optimal dan model kemitraan yang tidak terbentuk dengan dengan baik sehingga fluktuasi harga tidak dapat dihindari dikalangan petani kita khususnya di kabipaten konawe.

c. Hama dan penyakit

Hama dan penyakit pertanian dan peternakan sangat mengganggu hasil pertanian dan peternakan. Bahwakan tidak jarang kita temukan petani dan peternaka mengalami kerugian yang sangat besar karena fakto

hama dan penyakit ini. Hama seperti tikus dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi petani padi sawah. Selain itu penyakit tetelo yang terjadi pada peternakan sering mengakibatkan ternak mati dengan jumlah yang sangat besar.

Olehnya itu hama dan penyakit ini harus bias diminimalisir untuk mendapatkan produk pertanian dan peternakan yang maksimal. Dengan penguatan kelembagaan maka permasalahan-permasalahan yang dialami dapat langsung disampaikan kepada penyulu selaku Pembina kelompok misalnya dan disampaikan kepada lembaga-lembaga penelitian untuk dikaji mengenai penyebab-penyeba dari penyakit tersebut sehingga penyakit dan hama ini dapat ditangani dengan baik dan benar. Selain itu petani juga harus selalu menjalin kerja sama dengan beberapa mitra atau strckholder tertentu untuk mendapatkan bantuan obat-obatan dalam mencegah dan mengobati penyakit yang terjadi pada usahataannya.

d. Berkembangnya lembaga pengreditan tradisional

Sector kelembagaan perekonomian/keuangan diberbagai daerah sebagian besar belum ada. Hal ini mengakibatkan peran tengkulak/pengumpul dari pihak swasta mengambil alih peran yang lebih dominan dalam tataniaga usaha padi sawah dan peternakan. Pihak swasta bermitra dengan kelompok-kelompok pembudidaya pertanian dan peternakan yang ada dengan bunga yang cukup tinggi. Pihak swasta membantu dalam hal permodalan dan pemasaran bagi hasil-hasil

pertaniannya dengan harga yang relative murah. Sedangkan pihak swasta dapat mengumpulkan dan membeli hasil pertanian dan peternakan dari kelompok usahatani.

Permodalan/pengkreditan usaha yang dijalani pihak swasta melalui pinjaman keuangan, sarana prasarana yang dibutuhkan pembudidaya dapat dipenuhi oleh pihak swasta melalui perwakilannya. Akan tetapi segala aturan-aturan tentang pembelian dan pemasaran seperti nilai jual/harga mutlak ditentukan sepihak oleh swasta. Sehingga hal tersebut menyebabkan posisi tawar-menawar dari pihak kelompok usahatani menjadi rendah dan tidak menentu.

Hal ini menjadi salah satu factor ancaman yang dihadapi oleh kelompok usahatani yang ada di Kabupaten Konawe. Sistem pengkreditan yang ada di bank-bank BUMN dan swasta lainnya juga mempunyai suku bunga yang cukup tinggi yang membuat masyarakat petani menjadi takut untuk melakukan pinjaman. Olehnya itu pemerintah khususnya Kabupaten Konawe harus memperkuat kelembagaan yang dapat mendukung usaha tani yang ada dengan suku bunga yang rendah, selain itu juga dapat menumnuhkan kemitraan yang dapat memberikan bantuan permodalan dan lainnya sehingga dapat menjalin kerjasama dengan usahatani yang ada dengan kesepakatan yang baik dan benar.

e. Degradasi sumberdaya alam

Degradasi sumberdaya alam yang akan terjadi bukanlah diakibatkan oleh kegiatan pertanian, akan tetapi disebabkan oleh penggunaan-

penggunaan bahan-bahan kimia seperti halnya pestisida yang berlebihan dan pupuk anorganik yang dapat merusak struktur tanah. Selain itu juga dapat disebabkan oleh limbah-limbah hasil pertanian yang tidak dimanfaatkan dengan baik seperti mesin pengolah pertanian yang dapat menimbulkan pencemaran udara. Mesin pengolah yang tidak sesuai dengan tempatnya dan bahkan ditemukan mesin pengolah/penggiling keliling yang dapat menimbulkan pencemaran dimana-mana.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada mesin pengolah/penggiling padi yang dikelola secara bersama oleh kelompok, hanya dimiliki oleh orang-perorang atau individu saja. Hal ini menyebabkan dampak-dampak negative yang tidak diinginkan.

Selain itu juga banyaknya masyarakat yang menggunakan pestisida yang tinggi dan pupuk anorganik yang berlebihan dapat menyebabkan degradasi sumberdaya alam. Karena hal ini dapat kita ketahui bersama bahwa dapat merusak struktur tanah yang ada.

Olehnya itu harus ada penguatan kelembagaan yang dapat mengawasi masyarakat/anggota kelompok dalam penggunaan pestisida dan pupuk anorganik. Penguatan kelembagaan yang dapat menopang usaha tani yang ada sangat dibutuhkan agar petani dapat melanjutkan usahatannya tanpa ada permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan juga ditemukan bahwa sumberdaya alam diwilayah pertanian dan peternakan belum banyak dikaji pemanfaatan dan pengolahannya. Kajian yang ada cenderung

bersifat parsial atau pragmatif dan belum membentuk kegiatan holistic atau integrated, sehingga kebijakan pmda secara khusus dalam menangani degradasi sumberdaya alam masih kurang.

Paradigm kajian menjadi penting jika sumber daya pertanian dan peternakan serta perikanan menjadi alternative dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang terpadu/terintegrasi serta berkelanjutan. Kontribusi ketiga sector ini mempunyai nilai manfaat yang sangat penting dalam mendukung kemajuan suatu daerah dan bahkan suatu Negara. Selain itu ketiga sector ini menjadi syarat penting untuk dipenuhi karena bagia dari kebutuhan pangan pokok yang akan dikonsumsi oleh setiap umat manusia yang hidup di bumi ini. Olehnya itu penguatan lembaga dan penumbuhan kemitraan menjadi syarakt penting yang harus dilakukan untuk mendukung pengembangan sumberdaya alam tersebut demi memenuhi kebutuhan pangan masyarat yang semakin meningkat.

f. Kelembagaan atau kelompok yang kurang kuat

Dalam mengembangkan suatu komoditas pertanian dan peternakan harus didukung dengan kelembagaan yang sangat kuat. Kelembagan adalah suatu model yang mngelolah arah dan manajemen dalam pengelolaan suatu usaha tani. Kabupaten Konawe memiliki kelompok-kelompok usaha tani mulai dari : kelompok usaha tani padi sawah, kelompok usaha tani padi-ternak, kelompok usaha padi-ternak-tambak, dan kelompok usaha tani tambak. Namun kondisi dari kesemua kelompok tidak berjalan dengan efektif.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan dapat dilihat bahwa kelompok-kelompok usaha tani yang ada di Kabupaten Konawe masih belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi anggota kelompok dalam melakukan pertemuan kelompok. Berdasarkan hasil wawancara pertemuan kelompok sangat rendah, dan bahkan tidak jarang pertemuan kelompok tidak jadi dilakukan karena tidak ada yang datang. Kondisi ini menjadi suatu ancaman bagi keberlanjutan kelompok usaha tani yang ada di Kabupaten Konawe. Jika terus dibiarkan akan menyebabkan kelompok usaha tani yang ada tidak memberikan mafaat yang penting dalam perkembangan usaha tani masyarakat.

g. Keberpihakan perbankan

Mengingat kemampuan permodalan bagi pelaku utama dalam hal ini petani, peternak dan petani tambak di Kabupaten Konawe pada umumnya masih rendah, maka peranan lembaga perbankan sangat penting. Permodalan sangat dibutuhkan untuk membiayai investasi/mitra dan modal kerja mulai dari hulu sampai hilir. Akan tetapi resiko di bidang usahatani seperti padi sawah, ternak dan perikanan, umumnya sangat tinggi maka perbankan kurang memperhatikan untuk membiayai sector ini.

Program pembiayaan masih mensyaratkan agunan berupa sertifikat tanah sehingga belum dapat dinikmati bagi petani/bidang peternakan dan pengusaha kecil serta suku bunga untuk usaha di bidang pertanian, peternakan dan perikanan sama dengan suku bunga komersil padahal

usaha ini memerlukan tenggang waktu yang cukup lama untuk berproduksi dan dalam jangka waktu pendek kurang menguntungkan dibidang sector lainnya.

5.5. Inventarisasi dan pembobotan factor-faktor strategi lingkungan internal

Factor-faktor lingkungan internal yang berpengaruh terhadap pengembangan pembuatan kelompok usahatani pertanian, peternakan dan perikanan secara terpadu atau terintegrasi di Kabupaten Konawe terdiri dari keuntungan (strengths) dan kelemahan (weakness). Factor-faktor strategi yang menjadi kekuatan antara lain :

- 1) Kondisi lahan yang menunjang budidaya padi sawah dan peternakan serta perikanan.
- 2) Kesesuaian lahan dan daya dukung kawasan yang menunjang usaha tani
- 3) Dukungan ketersediaan tenaga kerja local
- 4) Sumberdaya petani
- 5) Minat petani
- 6) Potensi hasil pertanian, peternakan dan perikanan.

Di pihak lain factor-faktor strategi yang merupakan kelemahan antara lain :

- 1) Penyediaan/introduksi bibit unggul yang masih rendah
- 2) Kemampuan dan akses permodalan
- 3) Masih terbatasnya teknologi dan komoditas yang dikembangkan
- 4) Kurangnya seleksi hasil panen dan produksi secara optimal
- 5) Kontiyuitas dan kualitas produksi tidak stabil/rendah
- 6) Belum ada tempat pengolahan secara terpadu dan berkelanjutan

- 7) Pengolahan produk dan sistem aqua bisbis yang belum lancar
- 8) Pola tataniaga dan distribusi yang dijalankan relative panjang
- 9) Kelembagaan petani yang masih kurang baik
- 10) Penentuan standarisasi mutu hasil pertanian, peternakan dan perikanan
- 11) Pelayanan petugas penyuluhan yang tidak optimal

Hasil perhitungan dan pembobotan terhadap factor-faktor strategi internal secara berurutan mulai dari factor strategi internal dengan sector bobot tertinggi hingga yang terendah disajikan pada table 5.15.

Table 5.15. Urutan skor bobot factor-faktor strategi lingkungan internal

No	Factor-faktor strategi lingkungan internal	Skor bobot
	Kekuatan	
1	Kondisi lahan yang menunjang budidaya padi sawah dan peternakan serta perikanan.	0,072
2	Kesesuaian lahan dan daya dukung kawasan yang menunjang usaha tani	0,068
3	Dukungan ketersediaan tenaga kerja local	0,065
4	Sumberdaya petani	0,064
5	Minat petani	0,062
6	Potensi hasil pertanian, peternakan dan perikanan	0,061
	Kelemahan	
7	Penyediaan/introduksi bibit unggul yang masih rendah	0,070
8	Kemampuan dan akses permodalan	0,067
9	Masih terbatasnya teknologi dan komoditas yang dikembangkan	0,065
10	Kurangnya seleksi hasil panen dan produksi secara optimal	0,056
11	Kontiyuitas dan kualitas produksi tidak stabil/rendah	0,054
12	Belum ada tempat pengolahan secara terpadu dan berkelanjutan	0,052
13	Pengolahan produk dan sistem aqua bisbis yang belum lancar	0,051
14	Pola tataniaga dan distribusi yang dijalankan relative panjang	0,050
15	Kelembagaan petani yang masih kurang baik	0,049
16	Penentuan standarisasi mutu hasil pertanian, peternakan dan perikanan	0,048
17	Pelayanan petugas penyuluhan yang tidak optimal	0,046

Penjelasan masing-masing factor strategi internal tersebut, secara rinci sebagai berikut :

1. Kekuatan

a. Kondisi topografi wilayah yang menunjang kegiatan usaha tani

Kondisi topografi wilayah yang merupakan kekuatan yang dimiliki oleh Kabupaten Konawe sesuai untuk usaha pertanian peternakan dan perikanan. Hal ini didasarkan pada kondisi wilayah yang meliputi : 1) suhu, kelembaban, lahan yang datar, cahaya dan kondisi air irigasi yang baik, 2) tanah yang subur, jenis tana yang sesuai.

Berdasarkan parameter fisik dan kimia serta biologi wilayah Kabupaten Konawe menunjukan kisaran nilai sesuai dengan standar untul menunjang pelaksanaan pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan.

b. Memiliki kesesuaian lahan dan daya dukung yang memadai

Pada Kabupaten Konawe memiliki daerah pertanian yang cukup luas. Dengan menggunakan metode long line menunjukan lahan untuk pengembangan pertanian sangat memungkinkan.

Keseuaian lahan diperoleh dari luasan lahan pertanian dan peternakan serta perikanan yang sesuai untuk pengembangan pertanian, dalam hal ini padi sawah, peternakan dan perikanan di Kabupaten Konawe. Kapasitas luasan efektif yang memnuhi syarat daya dukung yang berdasarkan data tentang kondisi pertanian yang telah diperoleh baik dari hasil penelitian maupun dari pengamatan langsung, menunjukan bahwa

kondisi lahan pertanian untuk penanaman padi sawah, peternakan dan perikanan memenuhi criteria yang layak/ sesuai dengan ditunjukan daya dukung yang cukup dalam pengembangan kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan.

c. Dukungan ketersediaan tenaga kerja

Pengembangan usahatani secara terpadu/terintegrasi di Kabupaten Konawe terbukti telah memberikan peluang dan kesempatan kerja sama serta berusaha bagi masyarakat luas terutama petani, peternakan dan petani tambak. Kerja sama yang dibangun selama ini adalah pemilihan bibit, pembenihan/pembibitan, penggunaan alat pengalahn pertanian, pemeliharaan, panen dan pasca panennya, perdagangan sarana produksi, peralatan budidaya dalam usaha tani, distribusi, pemasaran, transportasi dan komunikasi.

Dukungan ketersediaan tenaga kerja keluarga di Kabupaten Konawe cukup tersedia khususnya keluarga petani dan peternak yang bermukim disekitar lokasi usaha taninya. Namun demikian ketika waktu panen tiba terkadang membutuhkan tenaga kerja lain/buruh dari desa. Jumlah tenaga kerja yang dari desa yang belum memiliki perjaan cukup banyak sehingga memungkinkan untuk tenaga kerja loka itu sangat banyak.

d. Sumber daya petani

Kegiatan pengembangan penguatan kelompok usaha tani secara terpadu di Kabupaten Konawe terutaman dalam kegiatan pertanian dan dan pasca panen, memerlukan jumlah dan frekuensi tenaga kerja yang lebih

besar. Kegiatan budidaya padi sawah, ternak unggas ayam buras, dan pemeliharaan ikan nila memerlukan tenaga kerja yang cukup banyak dan trampil dan berpendidikan. Sehingga dapat dengan mudah menerima pengarahan dari para penyuluh setempat dalam hal penentuan lokasi lahan yang sesuai untuk pertanian, peternakan dan perikanan. Pembuatan lahan budidaya pertanian, peternakan dan perikanan menggunakan metode long line, menanam, pemeliharaan untuk higienitas. Demikian halnya untuk kegiatan pasca panen, mengingat sifat padi sawah dan peternakan yang memerlukan waktu yang singkat berkisar 3-4 bulan yang dilakukan selama sepanjang kegiatan satu tahun sehingga kegiatan panennya pun harus dilakukan secara rutin sepanjang tahun.

e. Minat petani

Keberhasilan pengembangan pertanian dan peternakan melalui berbagai kegiatan kelompok dan kegiatan proyek, baik mulai anggaran APBD selama ini maupun mendorong kemauan petani untuk mengembangkan pertanian dan peternakan serta perikanan secara terintegrasi.

Tingginya minat petani terhadap budidaya padi sawah dan peternakan ditandai dengan semakin berkembangnya kegiatan penanaman varitas dan bibit baru yang dilakukan oleh petani/ peternak secara swadaya. Mengingat semakin maraknya program pemerintah untuk swasembada pangan maka petani dituntut untuk terus mengasah ketrampilan dalam mengelola usaha taninya sehingga dapat menghasilkan produk yang

berkualitas. Disamping itu juga semakin berkembangnya industry pertanian dan adanya kesepakatan Negara-negara asia dalam mendukung peningkatan pertanian adalah salah satu peluang yang harus dicapai oleh masyarakat petani. Adanya perdagangan bebas yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) menjadikan masyarakat untuk memulai usahataniya dengan manajemen yang baik. Kecenderungan prodak pertanian dan peternakan yang semakin meningkat, dengan masa panen yang relative singkat, menyebabkan semakin bertambahnya minat petani/peternak untuk mengembangkan dan memelihara komditas unggulannya masing-masing. Apalagi sekaran Kabupaten Konawe sudah memiliki cap untuk jenis beras dengan menjadi salah komoditas terbaik di Indonesia yaaitu beras konawe. Ini menjadikan konawe memiliki peluang untuk mengembangkan komoditasnya sehingga dapat memasuki pasar dunia.

f. Potensi hasil pertanian

Sejalan dengan perluasan areal pertanian dan peternakan serta perikanan dari tahun ketahun, maka produksi pertanian tersebut terus mengalami peningkatan yang cukup baik.

Kabupaten Konawe merupakan kabupaten yang berada dibawah administrasi provinsi Sulawesi Tenggara dan Luas wilayah daratan(setelah dikeluarkan Konawe Kepulauan) sebesar 580.073 Ha atau 5.800,73 km² atau 15,21 persen dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara. Kabupaten Konawe terbagi 23 Kecamatan yang tersebar di

337 desa/kelurahan. Kabupaten Konawe memiliki pulau kecil yaitu Pulau Bokori, Pulau Saponda Darat dan Pulau Saponda Darat. Luas wilayah menurut Kecamatan sangat beragam. Kecamatan Rounta merupakan wilayah kecamatan yang terluas yaitu sebesar 218.858 Ha sementara Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Konawe (Pemekaran dari Kecamatan wawotobi) luasnya 1.782 Ha atau 0,31 persen terhadap luas wilayah Kabupaten Konawe.

Produksi padi tahun 2005 tercatat sebanyak 117.688 ton atau naik 5,81 persen, jagung 2.378 ton atau naik 18,85 persen, ubi kayu 13.456 ton atau naik 21,94 persen, ubi jalar 4.130 ton atau naik 2,18 persen, sedangkan kacang tanah 657 ton atau turun 15,34 persen, kacang kedelai 640 ton atau turun 2,86 persen dan kacang hijau 640 ton atau turun 11,97 persen.

Secara umum jenis tanaman buah-buahan yang diusahakan meliputi 19 jenis tanaman. Dari 19 jenis tanaman buah-buahan yang diusahakan pada tahun 2005, produksinya terlihat sebagai berikut: pisang sebanyak 6.715 kuintal, jeruk 11.440 kuintal, nangka 6.113 kuintal, mangga 6.715 kuintal, rambutan 2.648 kuintal, pepaya 1.168 kuintal, langsung 20.367 kuintal, durian 4.138 kuintal, nenas 1.126 kuintal, jambu biji 1.527 kuintal, jambu air 1.379 kuintal dan 6 jenis lainnya, yaitu: sawo, belimbing, sirsak, salak, alpokat dan sukun yang produksinya dibawah 700 kuintal.

Pada umumnya jenis tanaman sayur-sayuran yang diusahakan di Kabupaten Konawe hanya disajikan 18 unit tanaman yaitu: bawang

merah, bawang putih, bawang daun, kubis, kentang, sawi, kacang merah, kacang panjang, cabe, wortel, tomat, terong, buncis, ketimun, labu, bayam, semangka dan kangkung. Produksi kacang panjang 10,217 kuintal, terong 4,687 kuintal, ketimun 7.749 kuintal, tomat 2.572 kuintal, kangkung 11,423 kuintal, bayam 4.014 kuintal, cabe 11,012 kuintal, sawi 4,682 kuintal, bawang daun 818 kuintal, kubis 2.341 kuintal dan labu 2.107 kuintal.

Jenis perkebunan rakyat yang diusahakan adalah kelapa, kopi, cengke, kakao, jambu mete, kapuk, kapas, kemiri, lada, pala, vanili, pinang, enau, tembakau dan sagu. Terlihat bahwa selama tahun 2005 luas tanaman dari beberapa jenis tanaman perkebunan rakyat yang terbesar adalah kakao seluas 18,059 ha, jambu mete seluas 15,579 ha dan kelapa seluas 9.128,7 ha, jenis tanama lainnya mempunyai luas tanaman dibawah 7000 ha.

Dari sisi produksi, jenis tanaman perkebunan terbesar adalah kakao 6.618,6 ton dan kelapa sebesar 4.197 ton, jenis tanaman lainnya mempunyai produksi tanaman dibawah 3000 ton.

Populasi ternak besar dan kecil seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi pada tahun 2005 berturut-turut tercatat sebesar 54.828 ekor, 584 ekor, 14 ekor, 12.375 ekor, 0 ekor dan 8.814 ekor. Dibanding dengan tahun 2004 berturut-turut tercatat sebesar 54.120 ekor, 595 ekor, 13 ekor, 10,702 ekor, 0 ekor dan 7.516 ekor. Berarti ternak yang

mengalami peningkatan adalah sapi, kuda, kambing dan babi, sedangkan yang mengalami penurunan adalah kerbau.

Populasi unggas selama tahun 2005 tercatat sebagai berikut: ayam buras 1.235.688 ekor, ayam ras 20.200 ekor dan itik manila 87.864 ekor. Dibanding tahun sebelumnya ayam buras meningkat 180.713 ekor (17,13 persen), ayam ras meningkat 2.700 ekor atau (15,43 persen) dan itik manila meningkat 5.802 ekor (7,07 persen).

Jumlah armada perahu/kapal yang digunakan untuk penangkapan ikan tahun 2005 tercatat sebanyak 3.960 unit. Sebagian besar berupa perahu tidak bermotor, yaitu 80,37 persen atau 3.197 unit, motor tempel sebesar 15,86 persen (628 unit) dan kapal motor sebesar 3,31 persen atau 131 unit.

Produksi perikanan selama tahun 2005 sebesar 20.994 ton dengan nilai 165.292,05 juta rupiah terdiri atas hasil budidaya 1474,2 ton dengan nilai 31.707,05 juta rupiah serta hasil penangkapan di laut dan perairan umum sebanyak 19.519,8 ton dengan nilai 133.585 juta rupiah, dibandingkan dengan tahun 2003 yang berjumlah 20.286 ton dengan nilai 170.183 juta rupiah, terdiri atas hasil budidaya 1.387 ton dengan nilai 39.944 juta rupiah serta hasil penangkapan di laut dan perairan umum sebanyak 18.899 ton dengan nilai 129.339 juta rupiah. (Data BPS Kab. Konawe)

Dengan peluang tersebut memungkinkan maka dimungkinkan untuk pengembangan komoditas pertanian, peternakan dan perikanan di Kabupaten Konawe sangat menjanjikan.

2. Kelemahan

a. Penyediaan/introduksi bibit unggul yang masih rendah

Kegiatan budidaya pertanian, peternakan dan perikanan mengalami hambatan dalam hal pengadaan bibit unggul. Hal ini terjadi ketika pada musim-musim tertentu hasil pertanian mengalami kegagalan dan tidak sebaik pada produk pertanian dari daerah lain. Hal ini disebabkan oleh varietas yang digunakan bukan varietas unggulan, sehingga hasilnya kurang memuaskan dan sering dikena penyakit. Oleh karena itu diperlukan bibit unggul yang cenderung adaptif terhadap kondisi lingkungan di Kabupaten Konawe.

Biasnya bibit unggul yang disediakan berasal dari lokasi lain seperti Sulawesi selatan. Hal ini memerlukan kelembagaan dan penunbuan kemitraan baru untuk memenuhi target tersebut. Menurut para budidaya, bahwa selama ini penggunaan bibit dari suatu daerah tertentu ada kalanya berkembang dengan baik, namun bibit yang sama dicobakan pada lokasi lainya tidak dapat tumbuh sebagai mana yang diharapkan.

Penggunaan bibit yang terus menerus dari sumber yang sama adakalanya mengalami penunbuan yang terus menurun dan bahkan stagnan. Untuk menjamin keberlangsungan budidaya dengan baik maka ketersediaan bibit unggul sangat diharapkan. Hampir seluruh Indonesia salah satu kendala dan kelemahan dalam kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan adalah belum tersedianya bibit unggul yang baik untuk

Bagi petani/peternak didaerah ini, modal kerja terutama dibutuhkan untuk biaya pembukaan lahan, pengadaan sarana produksi seperti bibit dan peralatan budidaya dan pasca panen. Ketika baru memulai usaha pada umumnya posisi petani/peternak dalam permodalan sangat rendah. Lembaga keuangan dan pengkreditan yang ada enggan untuk memberikan bantuan pinjaman pendanaan, apalagi pada umumnya tidak memiliki aset yang memadai sebagai agunannya. Akibatnya usaha pertanian dan peternakan yang dilaksanakan tidak memenuhi standard an ketentuan teknis yang ada. Misalnya penggunaan bibit yang masih varietas rendah, model pengelolaan pertanian yang masih tradisional sehingga hasilnya juga kurang optimal. Sementara petani/peternak yang sudah menghasilkan, biasanya sudah mulai ada kepercayaan dari lembaga pengreditan walaupun cukup membatalkan petani/peternak. Kebutuhan sarana produksi dan biaya pemeliharaan dapat dipayakan melalui kerja sama dengan pedang pengumpul. Sesuai informasi di lapangan bahwa pada umumnya kerjasama ini dilaksanakan dengan perjanjian pengenaan bunga sebesar 20% per bulan dari hasil budidaya. Hasil pertanian/peternakan harus dijual kepada pedang pengumpul yang memberikan fasilitas pinjaman tersebut.

Dalam hubungan penggunaan modal tersebut, peranan kelembagaan petani masih sangat lemah. Kondisi pengurus kelembagaan usahatani (kelompok tanil/ternak) dan koperasi belum mampu menyakinkan lembaga keuangan/pengkreditan yang ada aksesnya

terhadap informasi-informasi sumber permodalan yang baik. Oleh karena itu sangat diperlukan penguatan kelembagaan dan penumbuhan kemitraan dengan cara meningkatkan kompetensi pengurus-pengurus lembaga serta mempermudah petani dalam memperoleh akses permodalan.

c. Masih terbatasnya teknologi dan komoditas yang dikembangkan

Dewasa ini petani dan peternak didalam mengelola usaha taninya masih menggunakan metode dan teknik-teknik yang sederhana. Mulai dari pemilihan bibit yang masih menggunakan bibit local, sistem pemeliharaan ternak yang masih ekstensi, sistem penanganan hama dan penyakit yang masih tradisional, pasca panen yang menggunakan alat yang masih manual, sehingga menyebabkan petani tidak mendapatkan hasil yang optimal.

Pada tahap pemeliharaan yang masih menggunakan alat-alat tradisional, maka tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas yang didapatkan masih dibawah standar. Olehnya itu untuk meningkatkan produktifitasnya pemerintah harus membangun kemitraan yang baik dengan instansi-instansi terkait sehingga kelemagaannya menjadi kuat dan pelayan terhadap petani menjadi optimal.

d. Kurangnya seleksi panen dan produksi secara optimal

Pada budidaya ini melakukan pemanenan hasil pertanian dan peternakan yang berbeda dengan pemanenan pada awal. Panen yang dilakukan

oleh petani biasanya dilakukan secara serentak yang dicampur antara produksi yang baik dengan produksi yang kurang baik. Hal ini yang menjadi perhatian petani adalah kuantitas saja masalah kualitas belum menjadi persoalan.

Petani dalam memanen hasil pertaniannya tidak memperdulikan masalah kualitas, hal ini dikarenakan belum ada pengetahuan yang baik tentang kualitas suatu produk. Dengan demikian harus ada lembaga tersendiri yang dapat mengelola dan menyeleksi hasil panen hari petani dan peternak sehingga hasilnya dapat dibedakan mana yang kualitas baik dan kualitas kurang baik. Olehnya itu ini menjadi kelemahan yang dimiliki oleh petani/peternak yang ada di Kabupaten Konawe, dan harus mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk meningkatkan dapat menghasilkan produk-produk pertanian/peternakan yang berkualitas baik.

e. **Kontinuitas dan kualitas produksi tidak stabil/rendal**

Produksi dari hasil pertanian/peternakan dan perikanan setiap periodenya mengalami perubahan atau fluktuasi. Produksi pada musim kemarau lebih bagus kualitasnya daripada pada musim penghujan. Hal ini disebabkan oleh pada musim hujan banyak hama dan penyakit yang menyerang dan kurangnya pengawasan terhadap faktor tersebut. Selain hal tersebut juga dikarenakan kualitas bibit yang digunakan adalah kualitas yang kurang baik sehingga produksi hasil pertanian juga tidak menentu.

Teknologi formulasi untuk menghasilkan produk siap pakai bagi industry hillirnya masih dikuasai oleh kalangan tertentu saja yang memiliki modal dan networking yang jelas. Hal ini dikarenakan petani tidak mengetahui teknologi apa yang bisa digunakan untuk mengembangkan usaha taninya. Petani tidak mempunyai kemampuan untuk dapat mempertahankan produktifitas hasil pertanian/peternakannya dalam setiap periodenya. Sehingga hal tersebut menyulitkan petani untuk berbuat lebih besar lagi terkait dengan usahataniannya. Oleh sebab itu pemerintah harus jeli melihat persoalan-persoalan yang ada agar pemerintah dapat menekan dan meminimalisir keluhan atau kelemahan-kelemahan petani dalam mengembangkan usahataniannya.

f. **Belum adanya kawasan pengelolaan secara terpadu dan berkelanjutan**

Terjadinya konflik tumpang tindih penggunaan lahan oleh para pengguna untuk berbagai usaha/kegiatan pertanian dan peternakan serta perikanan menyebabkan usaha tani di Kabupaten Konawe sulit di kembangkan. Tidak adanya kawan yang tentukan oleh pemerintah langsung yang menjadi sentral pengelolaan dan pewasan usaha tani menjadikan kelompok usahatani tidak dapat terkontrol dengan baik.

Dengan banyaknya lokasi tempat pengolahan usaha tani masyarakat menjadikan permasalahan-pemmasalahan yang muncul menjadi sulit dikelola oleh pemerintah. Selain itu petani juga mengelola usahanya sesuai dengan keinginannya dan kesiapannya lahannya tanpa

mempertimbangkan persoalan-persoalan yang akan ditimbulkan yang dapat mengganggu petani/peternak lainnya.

Sehingga pemerintah kesulitan juga menentukan program yang tepat pada kelompok taninya. Olehnya itu pemerintah harus membentuk kelembagaan yang dapat mengawasi dan mengelola keberadaan dari para petani dan peternak, selanjutnya dapat mengelola usahanya secara terpadu dan terintegrasi di bawah pantauan dari pemerintah Kabupaten Konawe. Perlu penguatan kelembagaan dan penumbuhan kemitraan yang dapat menunjang keberlanjutan usahatani dan produktivitas yang berkualitas.

g. Pengolahan produk dan sistem akuisibis yang belum lancar

Hasil panen oleh petani dan peternak dijual dalam bentuk segar atau gelondongan tanpa dioleh terlebih dahulu. Sehingga menurunkan harga jual dan produk tersebut. Petani hanya menjual produknya dengan perhitungan sederhana dengan asumsi cepat mendapatkan uang. Padahal jika dioleh terlebih dahulu dan dijual dalam bentuk kemasan jauh lebih menguntungkan.

Tidak jarang juga petani mengolah hasil produaknya kepada pengolah dengan harga yang sangat murah dan bahkan dengan sistem barter. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan ada beberapa petani padi sawah, karena kurang modal, mereka menggunakan sistem barter dengan pengolah/pengilingan padi. Dengan perhitungan jika petani

menggiling bagahnya seberat 50 kg maka 10 kg itu adalah bagian untuk pengolah tersebut.

Kondisi ini dikarenakan rendahnya pengetahuan petani dalam mengkalulasi keuntungan-keuntungan yang diperoleh jika hasil pertaniannya dikelola dengan baik. Selain itu kurangnya peran serta kelompok usahatanya dalam memperhatikan kondisi anggotanya sehingga semua berjalan begitu saja dan bahkan jika dibiarkan akan menjamur dan bisa merugikan petani itu sendiri.

Posisi petani dan peternak sangat lemah. Karena tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan dalam mengelola usahanya. Disamping karena pengetahuan yang rendah, juga karena tidak adanya wadah atau lembaga yang bisa menjadi tepat mengaduh bagi petani dalam menularkan aspirasinya. Sehingga sangat sulit untuk mengembangkan usahanya apalagi untuk mendukung program pemerintah dalam swasembada pangan.

Pemerintah harus menyediakan lembaga yang menjadi tempat untuk pengaduan masyarakat petani dan peternak serta perikanan. Selain itu juga pemerintah harus membangun jaringan yang luas untuk membantu masyarakat tani, harus mencari mitra yang baik dalam mengelola dan mengawasi aktifitas petanian di Kabupaten Konawe.

h. Pola tatanan dan distribusi yang dilakukan relative panjang

Industry untuk produk pertanian dan peternakan yang secara khusus menghasilkan produk pertanian yang layak dan menguntungkan dengan

catatan di tunjang oleh jaminan produksi yang ada dan realisasi biaya sesuai dengan yang diperhitungkan. Sehingga dengan demikian arah pengembangan pertanian dan peternakan sekarang ditutamakan kepada peningkatan produksi, perbaikan tanilaga hasil pertanian dan peternakan serta peningkatan penanganan pasca panen. Rantai tanilaga perdagangan pertanian dan peternakan terdiri dari simpul-simpul pedagang local, antar pulau dan eksportir yang merupakan model yang hamper sama diseluruh Indonesia. Setiap simpul akan memproses lebih lanjut hasil panen petani dan peternak dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas supaya bisa diterima oleh pabrik-pabrik pengolahan hasil pertanian yang dijadikan pakan dan lain-lainya baik dalam negeri maupun di luar negeri.

Ketidakterkaitan perjanjian antara kelompok petani/peternak dengan pihak-pihak perusahaan pengolah mengakibatkan produk hasil pertanian kita tidak bisa di beli setiap saat. Dan bahkan terkadang dirugikan oleh beberapa pihak yang menyuruh menanan tetapi tidak bertanggung jawab setelah pasca panen hanya Karena perbedaan kualitas dengan hasil pertanian dari daerah lain.

Dengan demikian pihak swasta lebih dominan menguasai hasil produksi pertanian dan peternakan, disebutkan bahwa pihak perusahaan sebagai pihak penentu harga karena petani dibayar terlebih dahulu melalui sebagian besar barter barang dengan perusahaan dan akan dibayarkan selisihnya bila ada. Menurut swasta pembelian dengan nilai rendah juga

diakibatkan mutu produk akhir yang rendah serta kontinuitas produksi yang tidak stabil.

1. **Kelembagaan petani yang belum baik**

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan sector pertanian dan peternakan, pemerintah daerah dalam hal ini dinas pertanian Kabupaten Konawe telah melaksanakan pembinaan kelembagaan petani dan peternak yang sifatnya informal seperti kelompok tani, kelompok usaha bersama koperasi. Keberadaan kelembagaan tersebut diharapkan dapat menjadi wadah sebagai tempat belajar, sumber informasi dan bekerja sama antara anggota kelompok.

Namun demikian keberadaan kelompok petani/ternak dan petani tambak secara umum belum berfungsi dengan baik. Factor-faktor penyebab lemahnya fungsi dan peran kelembagaan kelompok tani adalah :

kelompok tani dibentuk berdasarkan kepentingan individu, secara umum bukan berdasarkan kesamaan komoditas yang dikembangkan, sehingga diantara anggota memiliki kepentingan yang berbeda.

Sebagian besar kelompok petani/ternak dan tambak ini dibentuk berdasarkan kepentingan kegiatan proyek-proyek pembangunan pertanian dan peternakan, sehingga aktifitasnya hanya terbatas selama kegiatan proyek tersebut berjalan.

Demikian pula halnya dengan lembaga kelompok usaha bersama dan koperasi yang keberadaannya juga belum berfungsi dengan optimal. Banyak terdapat lembaga koperasi unit desa yang sudah tidak aktif,

terapi badan hukumnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadinya

j. Penerapan standarisasi mutu hasil pertanian

Penerapan standarisasi mutu hasil pertanian dan peternakan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas produk pertanian dan peternakan yang dihasilkan di Kabupaten Konawe. Akan tetapi itu sulit untuk dicapai karena keberadaan petani yang masih menggunakan sistem tradisional dalam mengelola usahataniya.

Disamping kompleksnya permasalahan penanganan peningkatan mutu factor terpenting sebagai penyebab belum berhasilnya penerapan standarisasi mutu hasil pertanian adalah relative kecil atau bahkan tidak adanya harga yang berbeda bagi petani yang menjual produk pertaniannya yang bermutu tinggi. Dilain pihak untuk memproduksi hasil pertanian dan peternakan yang bermutu baik harus diperlukan permodalan yang besar, tenaga lebih, teknologi yang terbaru dan waktu yang intensif dalam proses pengeloaannya. Sehingga ini menjadi factor kelemahan yang dihadapi dikalangan petani dalam mengelola usaha taninya, sehingga diperlukan kelembagaan yang kuat agar petani dapat berusaha dengan pengawasan dan bantuan dari beberapa pihak yang terkait.

k. Pelayanan petugas penyuluh yang belum baik

Pelayanan dan pembinaan pembangunan pertanian dan peternakan di Kabupaten Konawe adalah menjadi tanggung jawab petugas penyuluh

dan dinas pertanian dan dari BP3K yang ditugaskan di masing-masing kecamatan.

Penyuluh yang berada dikecamatan yang merupakan ujung tombak penyelenggaraan pertanian dimasing-masing kecamatan, sebagai sumber informasi serta motivasi penyelenggaraan pemangunan pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah. Namun rendahnya intensitas pertemuan dan pelayanan yang dilakukan oleh pegawai penyuluh setempat menyebabkan informasi terkait dengan teknologi sangat sulit diperoleh petani dan peternak. Hal ini dikarenakan keberadaan petugas penyuluh di tingkat kecamatan masih didapatkan pada berbagai permasalahan antara lain : 1) dari segi jumlah petugas penyuluh yang belum memadai yang mana satu desa satu penyuluh belum terlaksanaan dengan baik, 2) kompetensi penyuluh yang masih relative rendah, hal ini dikarenakan penyuluh juga tidak pernah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di lokasi kerjanya, 3) materi penyuluhan yang diberikan masih belum tepat sasaran, artinya penyuluh tidak dapat memahami kondisi dan kemauan masyarakat sasaran karena adanya gap antar penyuluh dan petani, 4) penyuluh belum mendapatkan peningkatan kesjahteraan dalam hal ini kurangnya fasilitas kendaraan operasional lapangan, sehingga sangat membatasi pergerakan dari penyuluh itu sendiri.

Walaupun demikian kegiatan pembangunan pertanian dan peternakan ditingkat desa juga di dukung dengan keberadaan penyuluh lapangan. Tugas dan tanggung jawab penyuluh tidak ini tidak dapat berjalan dengan sebagai mana mestinya. Tugas penyuluh sebagai penyebar luas informasi, sebagai fasilitator dan sebagai penghubung tidak berjalan dengan efektif. Sehingga kegiatan pertanian tidak berjalan sesuai dengan rencana dan program yang dicanangkan pemerintah. Olehnya itu di butuhkan kelembagaan yang kuat dan penumbuhan kemitraan yang dapat mendukung kinerja penyuluh di lapangan.

5.6. Formula Strategi

Rumusan formula strategi pembangunan budidaya pertanian dan peternakan di Kabupaten Konawe dilakukan dengan matriks swot, yakni dengan cara mencocokkan antara factor strategi internal berupa kekuatan dan kelemahan dengan factor strategi eksternal dalam bentuk peluang dan ancaman. Dari hasil analisis sebagaimana diperhatikan pada table 4 diperoleh formula strategi seperti diralakan berikut ini.

Table 5.16. Formulasi strategi penumbuhan kemitraan daqn penguatan kelembagaan dalam rangka ketahanan pangan di Kabupaten Konawe

EFAS	IFAS	KELEMAHAN (W)
	<p>KEKUATAN (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi lahan yang menunjang budidaya padi sawah dan peternakan serta perikanan. 2. Kesesuaian lahan dan daya dukung kawasan yang menunjang usaha tani 3. Dukungan ketersediaan tenaga kerja local 4. Sumberdaya petani 5. Minat petani 6. Potensi hasil pertanian, peternakan dan perikanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan/introduksi bibit unggul yang masih rendah 2. Kemampuan dan akses permodalan rendah 3. Masih terbatasnya teknologi dan komoditas yang dikembangkan 4. Kurangnya seleksi hasil panen dan produksi secara optimal 5. Kontiyuitas dan kualitas produksi tidak stabil/rendah 6. Belum ada tempat pengolahan secara terpadu dan berkelanjutan 7. Pengolahan produk dan sistem aqua bisbis yang belum lancar 8. Pola taniaga dan distribusi yang dijalankan relative panjang 9. Kelembagaan petani yang masih kurang baik 10. Penentuan standarisasi mutu hasil pertanian, peternakan dan perikanan 11. Pelayanan petugas penyuluhan yang tidak optimal
<p>PELUANG (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pemerintah 2. Kesempatan kerja dan berusaha 3. Peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat 4. Permintaan pasar 5. Terbentuk kelompok usahatani 6. Tuntutan standar mutu 	<p>STRATEGI (SO)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kegiatan intensifikasi budidaya pertanian, peternakan dan perikanan dengan mempertimbangkan aspek biogeofisik (biologi, kimia, dan fisika) dengan kesesuaian lahan, serta daya dukung yang dapat menyerap tenaga kerja trampil yang lebih maju dan berkelanjutan. 2. Membuat kebijakan tertulis tentang pengawasan mutu hasil pertanian mulai dari bibit yang akan ditanam dan dipelihara secara 	<p>STRATEGI (WO)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengeluarkan kebijakan tentang varietas bibit yang dapat ditanam oleh petani melalui pengawasan yang ketat. 2. Pemberian bantuan modal dan bantuan sarana dan prasarana pertanian dengan pengawasan langsung oleh pemerintah 3. Memberdayakan kelembagaan perekonomian/keuangan berbasis masyarakat dengan memanfaatkan tenaga kerja local serta

<p>7. Investasi dan peranan swasta</p> <p>8. Keberadaan lembaga penelitian pengembangan pertanian terpadu</p> <p>9. Harga beli dolog yang tinggi</p>	<p>3. waktu panen yang baik</p> <p>Meningkatkan produksi dan kualitas produk dengan memperhatikan aspek penanganan dan teknis yang lebih maju dan berteknologi melalui pengembangan SDM dan informasi pada berbagai pelatihan dari lembaga penelitian</p> <p>4. Membentuk kembali struktur organisasi dalam kelompok yang ada di masing-masing usahatani</p> <p>5. Memberikan insentif kepada masing-masing anggota kelompok berdasarkan jumlah dan mutu hasil pertanian yang diperoleh dengan pengawan langsung oleh pemerintah</p> <p>6. Membentuk model usaha tani kemitraan yang terintegrasi antara pertanian, peternakan dan perikanan dengan mendatangkan beberapa inventor/ pemberi modal dengan perjanjian MoU sehingga petani bisa yakin.</p>	<p>mejaln kerja sama pemasaran local dengan pengusaha swasta melalui fasilitator pemerintah.</p> <p>4. Menumbuhkan kemitraan antara petani, pemerintah, dan lembaga pendidikan dan penelitian guna meningkatkan SDM dan pencapaian standar mutu produk</p> <p>5. Optimalisasi peran serta lembaga penyuluhan BP3K yang ada di kecamatan dalam rangka mengawal dan membimbing setiap item kegiatan dan teknologi yang diberikan agar tepat sasaran.</p>
<p>ANCAMAN (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi masyarakat rendah 2. Hama dan penyakit 3. Flutuasi harga hasil pertanian dan peternakan serta perikanan 4. Berkembangnya lembaga pengkreditan tradisional 5. Perdagangan global 6. Kelembagaan yang tidak kuat 7. Degradasi sumberdaya alam 8. Keberpihakan lembaga bank 	<p>STRATEGI (ST)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola kelembagaan usaha tani yang ada dengan memberikan reward kepada petani yang berhasil 2. Menentukan harga dasar dari hasil pertanian, peternakan dan perikanan di tingkat petani. 3. Membangun kawasan pertanian terpadu yang diawasi oleh pemerintah sehingga dalam pengawasan mengenai penyakit dapat tangani dengan cepat 4. Menyediakan lembaga pengkreditan dengan suku bunga yang rendah dan tanpa agunan dengan kesepakatan yang bersama. 5. Peningkatan keterampilan, sikap dan pengetahuan masyarakat petani tentang 	<p>STRATEGI (WT)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun mainset masyarakat terkait dengan usahatani untuk menghasilkan mutu yang baik dengan pembentukan perda untuk baku mutu produk sehingga dapat mempersiapkan diri pada era pasar MEA. 2. Membangun mainset masyarakat terkait dengan pentingnya kelembagaan dalam usaha tani sehingga mereka dapat terpacu untuk memperbaiki manajemen usahanya dalam mencapai swasembada pangan di Kabupaten Konawe 3. Membentuk team yang dapat menjalin kemitraan/ mencari mitra baik dengan sistem inti-plasma untuk permodalan, pemasaran dan bahkan investor yang dapat membantu masyarakat mengembangkan usahanya sehingga dapat menghasilkan produk yang

	<p>pemanfaatan lahan yang baik dengan tanpa menggunakan pestisida dengan pemberian <i>punishment</i> dan lebih mengarah pada pemanfaatan bahan-bahan organik dalam menjalankan usahanya</p>	<p>berkualitas baik</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Membangun pos pelayanan terpadu yang dikelola oleh lembaga penyuluhan agar masyarakat dapat mengadakan permasalahan yang dihadapi di lapangan dengan pengawalan langsung dari pemerintah daerah. 5. Mengaktifkan kembali koperasi unit desa dan bekerja sama dengan pemerintah dengan pengawasan langsung dari pemerintah daerah. 6. Melakukan pelatihan terpolo dan terjadwal tiap tahunnya kepada masyarakat petani yang mempunyai keterampilan yang rendah.
--	---	---

5.7. Prioritas Strategi

Seluruh formulasi strategi yang dihasilkan dari analisis menggunakan matriks swot pada prinsipnya sangat penting untuk menunjang pengembangan pertanian dengan model penguatan kelembagaan dan penumbuhan kemitraan dalam rangka ketahanan pangan di Kabupaten Konawe. Dari kesekian strategi yang ada tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Namun demikian karena keterbatasan sumberdaya yang dimiliki untuk melakukan seluruh strategi tersebut dalam kurung waktu yang bersamaan maka diperlukan urutan perincian prioritas dalam pelaksanaannya. Hasil perhitungan menggunakan Quantitative Strategi Planning Matriks (OSPM) di peroleh nilai total attractiveness score dari masing-masing strategi, hasil perhitungan tersebut kami sajikan pada table 5.17

Table 5.17 Penentuan Prioritas/Alternative Strategi Penguatan Kelembagaan Dan Penumbuhan Kemitraan Dalam Rangka Ketahanan Pangan Di Kabupaten Konawe

No	Strategi	Keterkaitan	Nilai total	Prioritas
I	S-O			
1.	Mengembangkan kegiatan intensifikasi budaya pertanian, peternakan dan perikanan dengan mempertimbangkan aspek biogeofisik (biologi, kimia, dan fisika) dengan kesesuaian lahan, serta daya dukung yang dapat menyerap tenaga kerja trampil yang lebih maju dan berkelanjutan.	S ¹²³¹ O ¹²⁶⁷	1,450	1
2.	Membuat kebijakan tertulis tentang penguasaan mutu hasil pertanian mulai dari bibit yang akan ditanam dan dipelihara secara waktu panen yang baik	S ²⁴ O ²⁴⁵⁶⁷	1,429	12
3.	Meningkatkan produksi dan kualitas produk dengan memperhatikan aspek penanganan dan teknis yang lebih maju dan berteknologi melalui pengembangan SDM dan informasi pada berbagai pelatihan dan lembaga penelitian	S ²⁶ O ²⁶	0,643	18
4.	Membentuk kembali struktur organisasi dalam kelompok yang ada di masing-masing usahatani	S ³⁴ O ⁴⁵⁶	1,264	7
5.	Memberikan insentif kepada masing-masing anggota kelompok berdasarkan jumlah dan mutu hasil pertanian yang diperoleh dengan pengawalan langsung oleh pemerintah	S ⁴⁵ O ⁵⁷	0,710	15
6.	Membentuk model usaha tani kemitraan yang terintegrasi antara pertanian, peternakan dan perikanan dengan mendatangkan beberapa inventor/ pemberi modal dengan perjanjian MoU sehingga petani bisa yakin.	S ¹⁴⁵ O ¹⁴⁵⁶	0,684	16
II	W-O			

14	0,739	W ¹²³⁴⁵⁶ O ²³⁴	1. Mengeluarkan kebijakan tentang vitetis bibit yang dapat ditanan oleh petani melalui pengawasan yang ketat.
13	0,813	W ¹²³⁴⁵⁶ O ¹³⁴⁵⁶	2. Pemberian bantuan modal dan bantuan sarana dan prasarana pertanian dengan pengawasan langsung oleh pemerintah
2	0,942	W ¹²³⁴⁵⁶ O ¹²⁵⁸	3. Memberdayakan kelembagaan perekonomian/keuangan berbasis masyarakat dengan memanfaatkan tenaga kerja local serta mejalin kerja sama pemasaran local dengan pengusaha swasta melalui fasilitator pemerintah.
17	0,671	W ¹³⁴⁷⁸⁹¹⁰ O ¹²⁵⁸	4. Menumbuhkan kemitraan antara petani, pemerintah, dan lembaga pendidikan dan penelitian guna meningkatkan SDM dan pencapaian standar mutu produk
5	1,351	W ⁶⁹¹¹ O ¹⁵⁸	5. Optimalisasi peran serta lembaga penyuluhan BP3K yang ada di kecamatan dalam rangka mengawal dan membimbing setiap item kegiatan dan teknologi yang diberikan agar tepat sasaran.
S - 1			
10	1,209	S ¹²³⁴⁵ T ¹⁴⁶⁸	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggelolah kelembagaan usaha tani yang ada dengan memberikan <i>reward</i> kepada petani yang berhasil
21	0,402	S ²³⁴⁶ T ¹³⁴⁵⁶⁸	2. Menentukan harga dasar dari hasil pertanian, peternakan dan perikanan di tingkat petani.
20	0,438	S ¹²³⁶ T ²⁶⁷⁸	3. Membangun kawasan pertanian terpadu yang diawasi oleh pemerintah sehingga dalam pengawasan mengenal penyakit dapat tangani dengan cepat
22	0,346	S ¹³⁴⁵ T ⁴⁵⁶⁸	4. Menyediakan lembaga pengkreditan dengan suku bunga yang rendah dan tanpa agunan dengan kesepakatan yang bersama.
19	0,581	S ²³⁴⁵⁶ T ¹²⁶⁷	5. Peningkatan keterampilan, sikap dan pengetahuan masyarakat petani

IV	W-T			<p>tentang pemanfaatan lahan yang baik dengan tanpa menggunakan pestisida dengan pemberian <i>punishment</i> dan lebih mengarah pada pemanfaatan bahan-bahan organik dalam menjalankan usahanya</p>
1.	Membangun mainset masyarakat terkait dengan usahatani untuk menghasilkan mutu yang baik dengan pembentukan perda untuk baku mutu prodak sehingga dapat mempersiapkan diri pada era pasar MEA	W ¹³⁴⁵⁶⁷⁸⁹¹⁰ T ¹⁴⁵⁶⁷⁸	1,235	9
2.	Membangun mainset masyarakat terkait dengan pentingnya kelembagaan dalam usaha tani sehingga mereka dapat terpacu untuk memperbaiki manajemen usahanya dalam mencapai swasembada pangan di Kabupaten Konawe	W ²⁴⁵⁶⁹¹¹ T ¹⁴⁵⁶⁸	1,396	3
3.	Membentuk team yang dapat menjalin kemitraan/ mencari mitra baik dengan sistem inti-plasma untuk permodalan, pemasaran dan bahkan investor yang dapat membantu masyarakat mengembangkan usahanya sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas baik	W ²⁶⁸⁹¹¹ T ¹⁴⁵⁸	1,244	8
4.	Membangun pos pelayanan terpadu yang dikelola oleh lembaga penyuluhan agan masyarakat dapat mengadukan permasalahan yang dihadapi di lapangan dengan pengawan langsung dari pemerintah daerah	W ¹²⁹¹¹ T ¹⁶⁸	1,323	6
5.	Mengaktifkan kembali koperasi unit desa dan bekerja sama dengan pemerintah dengan pengawan langsung dari pemerintah daerah	W ¹²⁶⁷⁸¹¹ T ¹⁴⁵⁸	0,953	11
6.	Melakukan pelatihan terpolat dan terpadat tiap tahunnya kepada masyarakat petani yang mempunyai keterampilan yang rendah	W ²⁵⁹¹⁰¹¹ T ¹²⁴⁸⁸	1,368	4

Berdasarkan hasil analisis SWOT, memberikan kontribusi rumusan strategi dan kebijakan penumbuhan kemitaan dan penguatan kelembagaan usahatani dalam rangka pencapaian ketahanan pangan di Kabupaten Konawe secara terpadu dan terintegrasi serta berkelanjutan. Urutan prioritas strategi penumbuhan kemitraan dan penguatan kelembagaan pada usahatani di Kabupaten Konawe dapat dilihat pada table 5.18 berikut ini.

Table 5.18 Urutan prioritas strategi penumbuhan kemitraan dan penguatan

Prioritas	Strategi
-----------	----------

1	Mengembangkan kegiatan intensifikasi budidaya pertanian, peternakan dan perikanan dengan mempertimbangkan aspek biogeotistik (biologi, kimia, dan fisika) dengan kesesuaian lahan, serta daya dukung yang dapat menyerap tenaga kerja trampil yang lebih maju dan berkelanjutan.
---	--

2	Memberdayakan kelembagaan perekonomian/keuangan berbasis masyarakat dengan memanfaatkan tenaga kerja local serta mejalin kerja sama pemasaran local dengan pengusaha swasta melalui fasilitator pemerintah.
---	---

3	Membangun mainset masyarakat terkait dengan pentingnya kelembagaan dalam usaha tani sehingga mereka dapat terpacu untuk memperbaiki manajemen usahanya dalam mencapai swasembada pangan di Kabupaten Konawe
---	---

4	Melakukan pelatihan terpoa dan terjadwal tiap tahunnya kepada masyarakat petani yang mempunyai keterampilan yang rendah.
---	--

5	Optimalisasi peran serta lembaga penyuluhan BP3K yang ada di kecamatan dalam rangka mengawal dan membimbing setiap item kegiatan dan teknologi yang diberikan agar tepat sasaran.
---	---

6	Membangun pos pelayanan terpadu yang dikelola oleh lembaga penyuluhan agan masyarakat dapat mengadukan permasalahan yang dihadapi di lapangan dengan pengawan langsung dari
---	---

7	pemerintah daerah.	Membentuk kembali struktur organisasi dalam kelompok yang ada di masing-masing usahatani
8	Membentuk team yang dapat menjalin kemitraan/ mencari mitra baik dengan sistem inti-plasma untuk pemodalan, pemasaran dan bahkan investor yang dapat membantu masyarakat mengembangkan usahanya sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas baik	Membangun mainset masyarakat terkait dengan usahatani untuk menghasilkan mutu yang baik dengan pembentukan perda untuk baku mutu prodak sehingga dapat mempersiapkan diri pada era pasar MEA
9	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola kelembagaan usaha tani yang ada dengan memberikan <i>reward</i> kepada petani yang berhasil	Mengembalikan kembali koperasi unit desa dan bekerja sama dengan pemerintah dengan pengawasan langsung dari pemerintah daerah.
10	Membuat kebijakan tertulis tentang pengawasan mutu hasil pertanian mulai dari bibit yang akan ditanam dan dipeliharahan secara waktu panen yang baik	Pemberian bantuan modal dan bantuan sarana dan prasarana pertanian dengan pengawasan langsung oleh pemerintah
11	Mengeluarkan kebijakan tentang viretas bibit yang dapat ditanam oleh petani melalui pengawasan yang ketat.	Mengeluarkan kebijakan tentang viretas bibit yang dapat ditanam oleh petani melalui pengawasan yang ketat.
12	Memberikan insentif kepada masing-masing anggota kelompok berdasarkan jumlah dan mutu hasil pertanian yang diperoleh dengan pengawan langsung oleh pemerintah	Memberikan insentif kepada masing-masing anggota kelompok berdasarkan jumlah dan mutu hasil pertanian yang diperoleh dengan pengawan langsung oleh pemerintah
13	Membentuk model usaha tani kemitraan yang terintegrasi antara pertanian, peternakan dan perikanan dengan mendatangkan beberapa <i>inventor</i> pemberi modal dengan perjanjian MoU sehingga petani bisa yakin.	Membentuk model usaha tani kemitraan yang terintegrasi antara pertanian, peternakan dan perikanan dengan mendatangkan beberapa <i>inventor</i> pemberi modal dengan perjanjian MoU sehingga petani bisa yakin.
14	Menumbuhkan kemitraan antara petani, pemerintah, dan lembaga	Menumbuhkan kemitraan antara petani, pemerintah, dan lembaga

	pendidikan dan penelitian guna meningkatkan SDM dan pencapaian standar mutu prodak
18	Meningkatkan produksi dan kualitas produk dengan memperhatikan aspek penanganan dan teknis yang lebih maju dan berteknologi melalui pengembangan SDM dan informasi pada berbagai pelatihan dari lembaga penelitian
19	Peningkatan keterampilan, sikap dan pengetahuan masyarakat petani tentang pemanfaatan lahan yang baik dengan tanpa menggunakan pestisida dengan pemberian <i>punishment</i> dan lebih mengarah pada pemafaatan bahan-bahan organic dalam menjalankan usahatani
20	Membangun kawasan pertanian terpadu yang diawasi oleh pemerintah sehingga dalam pengawasan mengenai penyakit dapat tangani dengan cepat
21	Menentukan harga dasar dari hasil pertanian, peternakan dan perikanan di tingkat petani.
22	Menyediakan lembaga pengkreditan dengan suku bunga yang rendah dan tanpa agunan dengan kesepakatan yang bersama.

5.8. Kebijakan pengembangan usahatani melalui penumbuhan kemitraan dan penguatan kelembagaan dalam rangka ketahanan pangan

Penentuan kebijakan pengembangan usahatani secara terpadu atau terintegrasi melalui penumbuhan kemitraan dan penguatan kelembagaan dalam rangka ketahanan pangan di 'Kabupaten Konawe secara berkelanjutan telah ditentukan berdasarkan hasil analisis SWOT ada 4 dimensi/pilar yaitu : 1) dimensi ekologis, 2) dimensi teknologi, 3) dimensi social ekonomi, 4) dimensi kemitraan, kelembagaan dan hukum.

1. Kebijakan berdimensi ekologis

Peningkatan kesadaran tentang kondisi lingkungan lahan pertanian dan kebersihan lokasi usahatani baik dibidang pertanian, peternakan, maupun perikanan menjadi factor yang sangat penting untuk di perhatikan. Berdasarkan prespektif pengelolaan wilayah pertanian secara terpadu dan terintegrasi, maka pengembangan pertanian tersebut harus berdasarkan pada pengelolaan berbasis ekosistem yang pada dasarnya adalah bagaimana mengelolah segenap kegiatan pembangunan yang dimanfaatkan ekosistem di wilayah pertanian agar total dampaknya tidak melebihi kapasitas fungsionalnya. Secara ekologis terdapat tiga persyaratan yang dapat menjamin tercapainya keberlanjutan bagi pengembangan pertanian, peternakan serta perikanan di Kabupaten Konawe yaitu : keharmonisan spasial (keterpaduan beberapa kepentingan dalam pemanfaatan kawasan pertanian), kapasitas asimilasi (kemampuan kawasan pertanian untuk mengembalikan pada kondisi awal/mengurangi) dan pemanfaatan keberlanjutan (untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi pemanfaatan pada generasi yang akan datang).

Kebijakan mengenai pembenahan kelompok usahatani dalam keharmonisan ruang (spasial harmony) seperti kegiatan untuk budidaya pertanian, alur tataniaga untuk kegiatan pertanian, kegiatan pemilihan varietas baru yang baik untuk ditanam dalam rangkan pelestarian pertanian (konvensional), wilayah pertanian tidak semua dimanfaatkan untuk ruang-ruang kegiatan

termasuk pengembangan pertanian (development zona) tetapi sebagian harus dilokasikan untuk zona preservasi dan konservasi.

Zona preservasi mengandung sumberdaya alam (flora, fauna dan mikroba), dan komponen ekosistem yang bersifat endemic, langka atau sangat berperan dalam membentuk keberlangsungan hidup ekosistem. Pada zona ini tidak diperkenankan adanya kegiatan lain kecuali untuk penelitian dan pendidikan, serta zona kegiatan konservasi secara terbatas dapat pula merupakan wilayah diperbolehkan berlangsungnya kegiatan budidaya pertanian, peternakan dan perikanan dengan pengawasan dari pemerintah setempat.

Dalam keberlanjutannya diperlukan kebijakan yang dapat mengatur sistem pertanian yang dilakukan oleh masyarakat pada zona tersebut. Zona pembnagunan ini memang merupakan zona untuk budidaya pertanian, peternakan dan perikanan sehingga wilayah tersebut harus dalam kondisi yang baik. Selain itu diperlukan kebijakan mengenai pengelolaan limbah-limbah pertanian terutama bidang peternakan dan perikanan. Dalam keberlanjutan usaha harus diatur mengenai pengelolaan limbah sehingga tidak menimbulkan dampak yang dapat menghambat keberlanjutan dunia usahatani tersebut. Oleh karena itu, pedoman pengelolaan lingkungan secara praktis (*best practice environmental management guidelines*) dalam industry-industri pertanian dan peternakan serta perikanan perlu diupayakan sebagai bentuk perbaikan dampak lingkungan dan meminimalkan biaya lingkungan.

Isu yang perlu diperhatikan dalam pengembangan usahatani adalah penggunaan beberapa bahan kimia seperti pestisida dalam pengelolaan pertanian perlu diperhatikan. Karena penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan degradasi lingkungan. Selain itu perlu diperhatikan keseimbangan (balance) antara kebutuhan industry pertanian untuk kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi (ekonomi growth) dengan potensi lingkungan (ecology protection). Implikasinya adalah semua stakeholders harus mengusahakan peningkatan daya dukung lingkungan melalui penerapan iptek yang tepat, benar dan dapat diterapkan.

2. Kebijakan berdimensi teknologi

Sistem usahatani baik bidang pertanian, peternakan dan perikanan mampu menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi, menguntungkan, simbiosis mutualisme (menguntungkan berbagai pihak yang terlibat) dan berkelanjutan. Berdasarkan dengan kondisi tersebut maka dalam pengelolaan dan pengembangannya harus berdasarkan pada kemampuan dan keinginan dari masyarakat petani dalam mengadopsi dan menerapkan teknologi-teknologi yang berkaitan dengan dunia usahanya. Petani harus mampu mengadopsi teknologi sederhana, murah agar dapat menghasilkan produk pertanian secara optimal. Penerapan teknologi yang tepat guna sangat penting diperhatikan dalam menjaga keberlangsungan usahatannya.

Beberapa aspek teknologi yang harus di atur dan diimplementasikan dalam pengembangan pertanian dalam rangka ketahanan pangan di Kabupaten Konawe, serta untuk menjamin kontinuitas kualitas dan kuantitas produk

adalah sebagai berikut : 1) penentuan kawasan untuk sebagai zona pembangunan pertanian secara terpadu dan terintegrasi dengan peternakan dan perikanan. Lokasi merupakan syarat utama dan harus sesuai dengan tata ruang dan persyaratan lingkungan. Selain itu sebelum melakukan budidaya terlebih dahulu dilakukan evaluasi lahan terkait dengan potensi-potensi apa saja yang dapat dikembangkan pada kawasan tersebut. 2) penyediaan bibit, untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas, bibit menjadi factor penting untuk diperhatikan. Bibit harus dipilih berdasarkan standar mutu yang telah ditentukan. Varietas-varietas unggul, bibit-bibit pertanian dan perikanan yang berkualitas baik harus menjadi perhatian utama agar dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas baik, yang dapat dipasarkan diseluruh Indonesia atau bahkan secara global. Bibit yang dipilih harus memilih bibit unggul yang diintroduksi dari daerah lain yang telah menerapkan dan menyiapkan pengadaan bibit unggul. 3) metode pertanian terpadu atau terintegrasi antara pertanian, peternakan dan perikanan. Metode ini sudah banyak dilakukan dan menunjukkan hasil yang maksimal. Pada metode ini menggunakan model simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan, diaman pada limbah-limbah hasil pertanian dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak dan perikanan sedangkan limbah peternakan dapat dimanfaatkan untuk pupuk organik di lokasi pertanian. Sehingga dengan sistem ini penggunaan bahan-bahan kimia dan pupuk an organik dapat dihindari dan kondisi lingkungan tetap terjaga dengan baik. 4) perawatan dan pengelolaan pertanian harus diperhatikan dengan baik.

Dalam perawatan tidak diperbolehkan untuk menggunakan bahan-bahan kimia dalam jumlah yang berlebihan yang dapat mengganggu keberlangsungan ekosistem. Pemerintah harus mengefektifkan peran penyuluh pertanian dalam hal melakukan monitoring dan dan pengawasan kepada petani-petani atau peternak yang ada pada zona development. Pemerintah dalam hal ini penyuluh setempat harus selalu mendampingi petani dalam mengelolah usahnya sehingga petani tidak salah arah dalam menerapkan teknologi-teknologi yang ada. 5) penanganan hama dan penyakit harus dilakukan secara berkala. Hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah melakukan identifikasi beberapa jenis hama dan penyakit yang terdapat pada lokasi tersebut. Setelah mengidentifikasi hama harus melakukan tindakan pencegahan dan pengobatan secara berkala. Peran penyuluh menjadi sangat dibutuhkan pada persoalan ini sehingga pemerintah benar-benar harus memperhatikan tingkat kesejahteraan penyuluh sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya di lapangan tidak mengalami hambatan apapun. 6) penanganan pasca panen menjadi factor yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah setempat. Pada saat panen yang perlu diperhatikan adalah umur panen dan cara panen yang baik sehingga tidak merusak kualitas dari produknya. Umur panen menjadi penting untuk diperhatikan karena ketika umur panen yang terlalu cepat maka kualitas dari produk akan berkurang, demikian halnya juga dengan umur yang terlalu tua akan mengurangi kualitas dari produk. Selain itu pemasaran juga menjadi factor yang sangat penting untuk

diperhatikan. Karena beberapa kasus petani sangat kesulitan memasarkan produk, sehingga produknya dijual dengan harga yang relative rendah meskipun kualitas yang dihasilkan baik.

Mutu hasil pertanian sangat ditentukan umur panen, cara panen, dan penanganan pasca panen yang harus mengikuti permintaan pasar. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diperlukan kebijakan tentang peraturan penggunaan teknologi pertanian yang tepat, ramah lingkungan dan tidak menimbulkan degradasi lahan.

3. Kebijakan berdimensi social ekonomi

Wujud dari dimensi social ekonomi dalam kegiatan pertanian yang terpadu dalam rangka ketahanan pangan adalah sebagai berikut : 1) terjadinya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat petani. 2) semua masyarakat petani dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam hal sadan dan pangan. 3) adanya partisipasi aktif dari masyarakat petani dalam pengelolaan pertanian melalui penguatan kelompok tani.

Peran serta masyarakat local dalam prinsip-prinsi Co-Management (informative, pendampingan, kooperatif, konsultatif, komunikatif, dan kontrol) harus lebih dikembangkan sehingga kebijakan dan program pengelolaah pertanian, peternakan dan perikanan yang dicanangkan oleh pemerintah dapat diterima sebagai suatu bagian dari kehendak masyarakat. Kebutuhan masyarakat diakomodir/diimplementasikan dalam bentuk pengelolaan efektif dan efisien agar tujuan mensejahterakan masyarakat dapat tercapai.

Peningkatan koordinasi antar instansi terkait dengan masyarakat local perlu dilakukan pada semua sisi kegiatan pengelolaan melalui perencanaan, penempatan kawasan atau zonasi, implementasi kegiatan dan evaluasi. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan lebih terpadu untuk menjamin terciptanya kesinambungan pengelolaan usahatani baik bidang pertanian, peternakan, maupun perikanan.

Sesuai dengan kondisi di atas, pemberdayaan masyarakat dan penumbuhan kemitraan serta penguatan kelembagaan pemerintah-masyarakat harus terus ditingkatkan. Sehingga mampu membentuk kesadaran dan melibatkan partisipasi aktif seluruh pengguna/stakeholders (petani, peternak, nelayan, LSM, kelompok usaha tani, serta kelembagaan terkait lainnya) untuk ikut menjaga keberlangsungan usahatani. Pada posisi ini, otonomi daerah menjadi sangat signifikan, dalam arti pengelolaan dan pelestarian lingkungan pertanian.

Dimensi ekonomi merepresentasikan permintaan (demand side) manusia terhadap hasil pertanian dan peternakan. Permintaan tersebut bukan hanya masyarakat setempat tapi masyarakat global secara umum (untuk kebutuhan ekspor). Apalagi pada era ekonomi yang bebas dan aktif yang dikenal dengan MEA (Masyarakat Ekonomi Asia), kebutuhan akan hasil-hasil pertanian sangat tinggi serta dapat bersaing dengan produk-produk dari luar negeri.

Berdasarkan kondisi tersebut maka, untuk menjamin keberlanjutan kegiatan usaha produksi pertanian yang lebih maju yang terpenting adalah bagaimana

pemerintah mengelola agar permintaan atau kebutuhan produk pertanian terjamin kualitas dan kontinuitas serta kuantitas pertanian. Usaha pertanian dapat lebih ditingkatkan sehingga dapat memacu roda perekonomian masyarakat setempat.

Pembentukan akses pasar dan akses ke lembaga keuangan seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Kelompok Usaha Tani (KUT), Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) dan perbankan bagi masyarakat/pengusaha khususnya pengusaha kecil menengah, dalam rangka pengembangan budidaya pertanian, peternakan dan perikanan harus dilakukan, sehingga dapat mendorong kegiatan produksi pertanian berbasis ekonomi rakyat, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Bertitik dari kegiatan tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi dan kesempatan berusaha, penyediaan bahan pangan dan rangkai ketahanan pangan kabupaten Konawe, mendorong pertumbuhan industri rumah tangga yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah dan devisa Negara.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka dilakukan kebijakan tentang penguatan pemberdayaan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pengelolaan, kesempatan berusaha, distribusi pendapatan dan membangun akses lembaga perekonomian berbasis masyarakat.

4. Kebijakan berdimensi kemitraan, kelembagaan dan hukum

Kegiatan usaha pertanian tidak dapat berjalan dengan maksimal tanpa dukungan dari stakeholder dalam hal ini kemitraan, kelembagaan dan hukum yang berlaku di kabupaten Konawe. Kemitraan adalah menjadi dimensi yang sangat penting untuk diperhatikan sehingga proses pengelolaan usaha pertanian berjalan dengan maksimal. Pemerintah harus bekerja sama dengan beberapa instansi terkait yang dapat menjalin kerja sama baik itu dalam pengadaan bibit unggul, penanganan penyakit, dan penanganan pasca panen atau pemasaran. Kesemua komponen ini sangat penting untuk diperhatikan agar mutu dari produk pertanian yang dihasilkan sesuai dengan standar mutu yang ditentukan.

Selain itu penguatan kelembagaan juga menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Penguatan kelompok usaha tani yang telah terbentuk menjadi faktor yang dapat mendukung keberlanjutan dunia usaha. Kelompok yang terbentuk diberikan peluang untuk mengembangkan diri dengan pengawasan dari pemerintah setempat. Aspek yang perlu diperhatikan adalah implementasi dari penegakan hukum dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang harus tegas dan konsisten serta transparan agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda. Apalagi terjadi konflik dalam pemanfaatan ruang yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan atau tumpang tindih kepentingan yang memberikan pengaruh negative antara petani.

Kontribusi lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah koordinasi antara lembaga terkait dan terhadap petani : koordinasi dari mulai tahapan

perencanaan program, implementasi sampai pada tahap pemantauan dan evaluasi, terpadu baik secara vertical maupun horizontal, agar tercipta kerjasama yang harmonis dan sinergis dalam pengembangan pertanian, peternakan, perikanan dalam rangka ketahanan pangan di Kabupaten Konawe.

Sehungan dengan hal-hal di atas maka diperlukan kebijakan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi kemitraan dan lembaga-lembaga terkait dalam pemanfaatan kawasan pertanian secara optimal. Penegakan aturan tegas dan konsistensi dalam memelihara performansi usha pertanian, peternakan dan perikanan dan lingkungannya serta koordinasi antara instansi/lembaga terkait yang lebih efektif dan terpadu.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal antara lain :

1. Karakteristik demografi masyarakat di Kabupaten Konawe masih relative produktif. Hal ini di tunjukan dengan umur petani yang masih produktif, pendidikan yang relative tinggi dan pengalaman bertani yang cukup lama.
2. Kelompok usaha tani yang terbentuk sudah terbentuk dengan maik tetapi sebagian besar adalah kelompok pemula. Hal ini menunjukan bahwa peran dari kelompok usaha tani masyarakat belum berjalan dengan maksimal.
3. Factor-faktor yang berpengaruh pada pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan di kabupaten konawe terdiri dari factor internal yang meliputi : 1) Kondisi lahan yang menunjang budidaya padi sawah dan peternakan serta perikanan. 2) Kesesuaian lahan dan daya dukung kawasan yang menunjang usaha tani. 3) Dukungan ketersediaan tenaga kerja local. 4) Sumberdaya petani. 5) Minat petani. 6) Potensi hasil pertanian, peternakan dan perikanan. 7) Penyediaan/introduksi bibit unggul yang masih rendah. 8) Kemampuan dan akses permodalan. 9) Masih terbatasnya teknologi dan komoditas yang dikembangkan. 10) Kurangnya seleksi hasil

panen dan produksi secara optimal. 11) Kontiyuitas dan kualitas produksi tidak stabil/rendah. 12) Belum ada tempat pengolahan secara terpadu dan berkelanjutan. 13) Pengolahan produk dan sistem aqua bisbis yang belum lancer. 14) Pola tataniaga dan distribusi yang dijalankan relative panjang. 15) Kelembagaan petani yang masih kurang baik. 16) Penentuan standarisasi mutu hasil pertanian, peternakan dan perikanan. 17) Pelayanan petugas penyuluhan yang tidak optimal. Sedangkan factor eksternal meliputi : 1) kebijakan pemerintah, 2) kesempatan kerja dan berusaha, 3) peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat 4) permintaan pasar, 5) terbentuk kelompok usahatani, 6) tuntutan standar mutu, 7) investasi dan peranan swasta, 8) keberadaan lembaga penelitian dan pengembangan pertanian terpadu. 9) partisipasi masyarakat rendah, 10) hama dan penyakit, 11) flutuasi harga hasil pertanian dan peternakan serta perikanan, 12) bunga kredit bank yang tinggi, 13) perdagangan global, 14) kelembagaan yang tidak kuat, 15) degradasi sumberdaya alam, 16) keberpihakan lembaga bank, 17) kurangnya peran P3K dalam penumbuhan kemitraan dan penguatan kelembagaan.

4. Strategi penumbuhan kemitraan dan pengutan kelembagaan dalam rangka ketahanan pangan kabupaten konawe meliputi 5 prioritas utama anatar lain : 1) Mengembangkan kegiatan intensifikasi budidaya pertanian, peternakan dan perikanan dengan

mempertimbangkan aspek biogeofisik (biologi, kimia, dan fisika) dengan kesesuaian lahan, serta daya dukung yang dapat menyerap tenaga kerja trampil yang lebih maju dan berkelanjutan. 2) Memberdayakan kelembagaan perekonomian/keuangan berbasis masyarakat dengan memanfaatkan tenaga kerja local serta mejalin kerja sama pemasaran local dengan pengusaha swasta melalui fasilitator pemerintah. 3) Membangun mainset masyarakat terkait dengan pentingnya kelembagaan dalam usaha tani sehingga mereka dapat terpacu untuk memperbaiki manajemen usahanya dalam mencapai swasembada pangan di Kabupaten Konawe. 4) Melakukan pelatihan terpola dan terjadwal tiap tahunnya kepada masyarakat petani yang mempunyai keterampilan yang rendah. 5) Optimalisasi peran serta lembaga penyuluhan BP3K yang ada di kecamatan dalam rangka mengawal dan membimbing setiap item kegiatan dan teknologi yang diberikan agar tepat sasaran.

5. Kebijakan pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan melalui penumbuhan kemitraan dan penguatan kelembagaan dalam rangkan ketahanan pangan kabupaten konawe meliputi 4 dimensi/ pilar utama. 1) dimensi ekologis, 2) dimensi teknologi, 3) dimensi social ekonomi, dan 4) dimensi kemitraan, kelembagaan dan hukum.

6.2. Rekomendasi

1. Pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan penetapan pilar-pilar pengembangan pertanian, peternakan, dan perikanan secara terpadu dalam rangka penumbuhan ekonomi daerah.
2. Mengembangkan kegiatan intensifikasi budidaya pertanian, peternakan dan perikanan dengan mempertimbangkan aspek biogeofisik (biologi, kimia, dan fisika) dengan kesesuaian lahan, serta daya dukung yang dapat menyerap tenaga kerja trampil yang lebih maju dan berkelanjutan.
3. Pemerintah dapat memberdayakan lembaga petani dan peningkatan lembaga penunjang seperti kelompok-kelompok yang sudah terbentuk
4. Pemerintah mengembangkan SDM & informasi pada lembaga penelitian dan lembaga teknis/ penelitian guna peningkatan produksi dan kualitas produk pertanian dengan memperhatikan aspek penanganan dan teknis lebih maju dan berteknologi
5. Pemerintah dapat mengatur jalur tataniaga pemasaran produk pertanian dengan standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah
6. Pemerintah menentukan wilayah atau zona pemangunan untuk pertanian, peternakan dan perikanan secara terintegrasi sehingga dapat dicontrol dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe. 2004. Konawe Dalam Angka 2003. Deptan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe. 2014. Konawe Dalam Angka 2013. Deptan.
- Baumann, P. 2000. Equity and efficiency in contract farming schemes: The experience of agricultural tree crops. Working Paper 139, ODI, London, UK.
- Bulkis. 2012. Ketahanan Pangan Rumah tangga Pedesaan. Arus Timur. Makasar
- Deptan. 1997. SK. Mentan No. 944/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Penetapan Tingkat Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Pemerintah Propinsi Bali. 2004. Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Pembangunan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Bali Tahun 2003. Denpasar.
- Eaton, C.S. and A.W. Shepherd. 2001. Contract Farming-Partnerships for Growth. *A GS Bulletin* No. 145. Food and Agriculture Organization, Rome.
- Erwidodo, DKK. 1999. Pengkajian Diverifikasi Konsumsi Pangan Utama di Indonesia. Pusat Penelitian Social Ekonomi Pertanian . Deptan. Bogor
- Haryadi, T. 2002. Study on the Diffusion Process of Agricultural Technology Innovation. Disertasi. Science of Plant and Animal Production, Management and Economics of Agricultural and Forestry United Graduate School of Agricultural Science, Tokyo University of Agricultural and Technology. Tokyo.
- Kartasmita, G. 1996. Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. CIDES, Jakarta.
- Nazlah, 2008. Evaluasi Pencapaian Program Pengembangan Sapi Potong Pola Gaduhan Di Kabupaten Mamuju. Tesis. Fakultas Peternakan Program Pasca Sarjana. UGM. Yogyakarta.
- Nugroho, B. 2006. Pengantar Memahami Ekonomi Kelembagaan. Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Pearce, D. dan R.K. TURNER. 1990. Economic of Natural Resources and The Environment. Harvester Wheatsheaf, New York. p. 378.

- Saptana 2012. Kelembagaan Kemitraan Usaha Dalam Mendukung Agribisnis Unggas Lokal Yang Berkelanjutan. *Workshop Nasional Unggas Lokal 2012*.
- Santoso, U. 2006. Manajemen Usaha Ternak Sapi Potong. Penebar swadaya. Jakarta.
- Sonbait, L.Y. K.A. Santosa, Panjono. 2011, Evaluasi Program Pengembangan Sapi Potong Gaduhan Melalui Kelompok Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat Di Kabupaten Manokwari Papua Barat. *Buletin Peternakan*. Vol 35 (3); 208-217.
- Suratiah, K. 2006. Ilmu Usaha Tani. Penebar Swadaya. Jakarta.

Lampiran-Lampiran















